

**Pemerintah Kota  
Parepare  
Dinas Kesehatan**

**REVISI  
RENCANA  
STRATEGIS**

**2018 - 2023**

**No Dokumen : 000/01/Revisi Renstra 2018-2023/2021**  
**Tanggal Dokumen : 28 Juni 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Jualah Penyusunan Revisi Renstra 2018-2023 Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun dapat diselesaikan.

Revisi Renstra 2018-2023, merupakan gambaran *blue print* Dinas Kesehatan Kota Parepare dan juga sebagai pedoman perencanaan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun yang searah dengan Visi dan Misi Bapak Walikota Parepare.

Diharapkan Revisi Renstra 2018-2023 ini dapat dijadikan acuan seluruh staf Dinas Kesehatan Parepare dalam pencapaian target Revisi RPJMD 2018-2023. dan juga dapat Revisi Renstra 2018-2023 dapat menjadi referensi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam Revisi Renstra 2018-2023 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Revisi Renstra 2018-2023 di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Penyusunan Revisi Renstra 2018-2023 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Penyusunan Revisi Renstra 2018-2023 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan Kota Parepare

Parepare, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Kesehatan,

  
**Rahmawaty, SKM, M.Kes (MARS)**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750121 200212 2 004

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin. Hal ini seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- 1) Upaya Kesehatan
- 2) Pembinaan Kesehatan
- 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan
- 5) Manajemen dan informasi kesehatan
- 6) Pemberdayaan Masyarakat

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dan disusun sesuai tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kota Parepare periode 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare beserta jaringannya maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk tahun 2018-2023.

Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2013-2018), Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare periode yang lalu.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Kesehatan Kota Parepare berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare ini dapat digunakan sebagai :

1. Acuan penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare
2. Dasar Penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
3. Acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Parepare.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011).
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009).
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
19. Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018-2023 ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2018 -2023;
2. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk kurun waktu 2018-2023.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare setiap tahunnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
4. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi kinerja dimasa mendatang.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II        GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Parepare
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE**

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Gambaran pelayanan kesehatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare dari tahun 2013-2017 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

#### 2.1 . Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesehatan;
- b. pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagaimana telah ditetapkan, dijabarkan menjadi tugas dan fungsi mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV, selanjutnya dijabarkan lagi menjadi uraian tugas sesuai dengan program dan kegiatan.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dari unsur-unsur organisasi maka tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat Eselon II, III dan IV adalah sebagai berikut :

#### 1. KEPALA DINAS KESEHATAN

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang Kesehatan;
  - c. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang Kesehatan;
  - d. Melaksanakan dan menyelenggarakan bidang Kesehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- e. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembina karier;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesehatan;
- g. Melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

## 2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :
  - a. Merencanakan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas kesehatan;

- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja kepala sub bagian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan lingkup Dinas Kesehatan;
- f. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, perencanaan dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### 2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
  - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup sub bagian;
  - c. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - d. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas sub bagian;
  - e. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelaksanaan tugas sub bagian;

- f. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen, arsip kepegawaian, inventaris barang dan perlengkapan secara rapi;
- g. Melakukan kegiatan administrasi persuratan sesuai tata naskah dinas;
- h. Mengelola administrasi kepegawaian, barang inventaris, perpustakaan serta rumah tangga dinas;
- i. Menerima, memproses serta mendistribusikan surat kedinasan;
- j. Mengelola dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris dinas;
- k. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- l. Membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mencari solusi atas masalah tersebut;
- n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas sub bagian;
- o. Membantu sekretaris dalam penyusunan LAKIP dinas;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. 2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan sub bagian, membantu pelaksanaan tugas Sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rincian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;

- b. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
  - c. Menyusun daftar usulan kegiatan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LPKJ, RENSTRA, dan Profil), laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
  - e. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
  - f. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas kesehatan;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas kesehatan;
  - h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas kesehatan;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan status kesehatan keluarga, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, mengadakan supervisi dan bimbingan teknis dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
  - (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
    - a. pembinaan dan pelaksanaan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit;
    - b. penyebarluasan informasi di bidang kesehatan dan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan imunisasi;
    - c. penyusunan program peningkatan gizi masyarakat; dan
    - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - (3) Rincian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja;
- b. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan institusi, kegiatan bina peran serta masyarakat dalam rangka mempercepat tumbuhnya gerakan-gerakan hidup sehat di masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- d. melaksanakan pembinaan kesehatan ibu, anak dan keluarga;
- e. melaksanakan pembinaan gizi masyarakat;
- f. mencari, menghimpun dan menyebarkan informasi serta pengembangan promosi kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan Pengambilan tindakan bila ada Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
- h. melaksanakan pengolahan dan Penyebarluasan data penyakit menular sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mengambil tindakan;
- i. melaksanakan pengadaan penyelidikan dan penelitian di lapangan bila ada suatu kejadian luar bias, dan Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi suatu program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. melaksanakan pengamatan penyakit terhadap keadaan perpindahan penduduk melalui upaya kesehatan transmigrasi, upaya Kesehatan Haji, upaya Kesehatan pariwisata serta Upaya Penanggulangan dan Pencegahannya dan pengamatan penyakit menular melalui pencatatan pelaporan dari puskesmas;
- k. merencanakan dan pembuatan target sasaran imunisasi;
- l. melaksanakan pendistribusian Vaksin ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dan Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengembangan teknis imunisasi;
- n. menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, wabah penyakit serta penanganan masalah kesehatan pasca bencana;
- o. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, kesehatan kerja dan olahraga dan pengawasan tempat-tempat umum;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga, ibu, anak, dan pengawasan makanan dan upaya peningkatan gizi masyarakat.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Rincian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai berikut :

- a. Menyusun/merencanakan, melaksanakan pembinaan program kesehatan keluarga meliputi kesehatan reproduksi, ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, kesehatan anak sejak usia perinatal, usia prasekolah termasuk usila;
- b. Melaksanakan pengawasan pada upaya peningkatan kesejahteraan/kesehatan keluarga baik instansi pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat;
- c. Melaksanakan kegiatan terpadu dengan program kesehatan lainnya dan sektor lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesehatan keluarga;
- d. Melaksanakan sistim pencatatan dan pelaporan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesehatan keluarga;
- e. Melaksanakan Pengembangan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga mengembangkan hidup sehat di sekolah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi para anggota keluarga;
- g. Melaksanakan koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan lalu lintas program dalam pembinaan kesehatan keluarga;
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan usia lanjut, kesehatan ibu dan anak/KB, gizi dan UKS;
- i. Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat;

- j. Melaksanakan kegiatan terpadu dengan program kesehatan lainnya dan sektor lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan gizi;
- k. Melaksanakan sistim pencatatan dan pelaporan yang berhubungan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat;
- l. Melaksanakan /pengembangan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, mengembangkan hidup sehat di sekolah;
- m. Memeriksa kesehatan bagi para pekerja dan usia lanjut di kelompok-kelompok kerja dan kelompok usia lanjut;
- n. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan usia lanjut, kesehatan ibu dan anak/KB, gizi dan UKS;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi yang terkait dengan peningkatan kesehatan keluarga;
- p. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- q. Melaksanakan bimbingan dan latihan bagi peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan pemerintah, swasta termasuk dukun bayi dalam usaha peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- r. Melaksanakan/mengolah data program pembinaan peningkatan kesehatan keluarga;
- s. Merencanakan/menyusun program peningkatan gizi keluarga;
- t. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan berbagai bentuk makanan bagi terpenuhinya mutu menu makanan termasuk penanggulangan kelainan gizi;
- u. Melaksanakan bimbingan/latihan tentang upaya-upaya peningkatan gizi keluarga;
- v. Melaksanakan analisa, mengolah data program peningkatan gizi keluarga;
- w. Melaksanakan pengelolaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi;
- x. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3.2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengendalian kualitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan sanitasi tempat-tempat umum.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat dalam lingkup seksi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat dalam lingkup seksi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengawasan sanitasi dan penyehatan perumahan serta lingkungan pemukiman;
  - b. Melaksanakan pengawasan penyehatan tempat-tempat umum dan industri meliputi penyehatan hotel, rumah sakit/sarana kesehatan, angkutan umum, tempat-tempat ibadah, pasar/swalayan, tempat pangkas rambut tradisional;
  - c. Melaksanakan pengawasan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sekolah, sanitasi anak sekolah, sanitasi kantin sekolah;
  - d. Melaksanakan pengawasan, penyehatan makanan dan minuman meliputi penyehatan rumah makan/restoran, jasa boga, makanan jajanan, dan tempat pengelolaan makanan lainnya;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan penanggulangan keracunan makanan;
  - f. Mengadakan pelatihan untuk mendapat sertifikat SP;
  - g. Melaksanakan pengamanan pestisida serta pengendalian dan penanggulangan resiko keracunan pestisida;
  - h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan zat adiktif yang membahayakan kesehatan serta penanggulangan keracunan makanan;
  - i. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan pemberian rekomendasi kelayakan pada rencana pembangunan sarana;
  - j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - k. Mendata dan inventarisasi tentang jumlah dan jenis sarana tempat-tempat penjualan dan pengguna pestisida (TP3) Sanitasi industri, pemukiman, sarana tempat-tempat umum, sarana air bersih yang telah dibangun, pengendalian sampah dan air limbah;
  - l. Mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data sarana tempat-tempat umum, sarana air bersih dan sarana tempat-tempat penjualan dan penggunaan pestisida, sarana industri, pemukiman pengendalian sampah dan air limbah serta memberikan petunjuk teknis tentang cara membuat sarana air bersih dan jamban keluarga;
  - m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana tempat-tempat umum, sarana tempat-tempat penjualan dan penggunaan pestisida, sarana industri, pemukiman, pengendalian sampah dan air limbah serta memberikan petunjuk teknis tentang cara membuat sarana air bersih dan jamban keluarga;

- n. Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan fasilitas/sarana kesehatan lingkungan/kebersihan lingkungan, pengadaan dan perbaikan sarana air bersih, usaha-usaha penjualan/perbaikan/perumahan dan pemukiman serta sarana air limbah;
- o. Menanggulangi gangguan kesehatan pada masyarakat yang kemungkinan ditimbulkan oleh sarana tempat-tempat umum serta ditimbulkan oleh pestisida.
- p. Melaksanakan pengendalian terhadap kesehatan lingkungan sumber-sumber air bersih;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan sarana air bersih serta kegiatan lainnya;
- r. Melaksanakan pengetahuan, pengawasan, dan pembinaan upaya kesehatan kerja;
- s. Melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga;
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan *District Surveillance System (DSS)*, yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta membuat laporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data P2 bersumber dari binatang dan penyakit menular langsung;
  - c. Melaksanakan pengamatan dan pengambilan tindakan terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan masalah kesehatan pasca bencana

- c. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber dari binatang, penyakit menular dan tidak menular;
- d. Melaksanakan tugas terintegrasi kesehatan matra yang meliputi kesehatan haji dan pelabuhan;
- e. Melaksanakan pengelolaan vaksin rutin dan insidental;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data imunisasi;
- g. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan imunisasi pada pelaksanaan Posyandu dan unit kesehatan lainnya;
- h. Melaksanakan penyebaran informasi;
- i. Mengevaluasi dan membuat laporan;
- j. Melaksanakan pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadi wabah;
- k. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan survailans;
- l. Memelihara kesehatan matra (pelabuhan) dan kesehatan haji;
- m. Menyelidiki dan mengamati Vektor penyebab penyakit;
- n. Mengamati penyakit yang disebabkan Vektor;
- o. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pemberantasan Vektor yang menyebabkan penyakit;
- p. Menanggulangi dan mengobati penyakit;
- q. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyakit menular;
- r. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. BIDANG PELAYANAN, PROMOSI DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

- (1) Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan untuk peningkatan dan pengembangan rumah sakit Pemerintah Daerah dan swasta, Puskesmas, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengembangan usaha pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, pengaturan dan pemberian izin Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, pengobatan tradisional, usaha farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program bidang medik dasar, peningkatan di bidang sarana dan prasarana kesehatan bidang farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan;

- b. Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah daerah dan swasta;
  - c. Pengawasan distribusi NAPZA dan bahan berbahaya lainnya;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan usaha pengembangan rumah sakit, poliklinik, puskesmas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan analisa dan penilaian terhadap ketersediaan sarana pelayanan dasar, penggunaan alat perlengkapan rumah sakit, puskesmas serta alat-alat medik dan pelayanan kefarmasian;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis mutu pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kefarmasian;
  - e. menyusun bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, pengaturan dan pengoperasian sistem kesehatan;
  - f. menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat;
  - g. mengkoordinasikan ketersediaan, jaminan mutu, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan/alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, kesehatan dasar (puskesmas dan *buffer stock*);
  - h. menyelenggarakan perumusan bahan untuk penyusunan pelayanan bidang medik dasar (puskesmas dan rumah sakit, specialist, gigi, rujukan, keperawatan), kebutuhan obat dan perbekalan/alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
  - i. melaksanakan pengendalian pengelolaan obat dan berbekalan/alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pendistribusian serta pencatatan dan pelaporannya untuk pelayanan kesehatan;
  - j. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengaturan, dan perizinan sarana Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, sarana distribusi sediaan farmasi, serta sarana distribusi perbekalan/alat kesehatan;;
  - k. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengaturan dan pemberian izin kerja/praktek tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi/apoteker/asisten apoteker/bidan/dll), termasuk pengobatan tradisional (battra);

- l. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penggerakan Penggunaan Obat Rasional (POR);
- m. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan mekanisme pelaporannya;
- n. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan dan pengamanan distribusi NAPZA dan bahan berbahaya, sediaan farmasi (obat, bahan obat, kosmetika dan obat asli Indonesia/obat Tradisional), perbekalan/alat kesehatan, serta makanan/minuman;
- o. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembiaian dan pengawasan kegiatan pengobatan tradisional (batantra);
- p. menyusun/meyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan obat asli Indonesia;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta penyiapan data/bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

#### 4.1. Seksi Pelayanan Kesehatan

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan rumah sakit, puskesmas, pengawasan dan pengembangan peralatan medik dan penunjangnya, serta sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan PKM;
  - b. melaksanakan penerapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengelolaan peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan khusus (RB, Balai Kesehatan, Praktek swasta umum dan gigi (perorangan atau berkelompok dan pengobatan tradisional) dan laboratorium serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan Khusus dan rujukan, serta menganalisa/mengevaluasi laporan perkembangan dan pelaksanaannya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengelolaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan pembinaan, pencatatan dan pelaporan penggunaan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan (SP2TP);
- g. membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
- h. melaksanakan perencanaan dan pembinaan perkembangan Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
- i. melaksanakan pembinaan kepada Rumah Sakit dalam rangka usaha pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan;
- j. merencanakan kegiatan kebutuhan obat-obatan dan kesehatan;
- k. mengumpulkan data pengelolaan Puskesmas dan Yankesda;
- l. melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin serta sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- m. melaksanakan bimbingan usaha peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pembantu;
- n. melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengembangan ke arah pencapaian target sesuai rencana program;
- o. mengumpulkan dan menganalisa data dari Rumah Sakit dan Puskesmas;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi, penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;

- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan upaya penyebarluasan informasi kesehatan guna memberdayakan masyarakat ke arah Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
  - c. melaksanakan bimbingan/latihan tentang pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh kesehatan;
  - d. melaksanakan, menganalisa data penyuluhan kesehatan masyarakat serta wilayah percontohan PHBS;
  - e. melaksanakan promosi kesehatan dan upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat menuju kemandirian untuk hidup sehat;
  - f. melaksanakan dan mengembangkan program upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat termasuk JPKM;
  - g. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, rokok, alkohol dan barang berbahaya lainnya;
  - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan UKS dan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4.2. Seksi Sumber Daya Kesehatan
- (1) Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan inventarisasi dan pendataan terhadap tanaman obat asli indonesia dan makanan.
- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan seksi;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat untuk Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dasar (*Puskesmas dan buffer stock*);
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, kosmetika, dan obat tradisional/obat asli Indonesia), meliputi: pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pendistribusian, serta pencatatan dan pelaporan pada sarana Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi obat dalam rangka penggerakan Penggunaan Obat Rasional (POR);
- e. Melaksanakan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan mekanisme pelaporan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan distribusi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), bahan berbahaya, sediaan farmasi, serta makanan/minuman;
- g. Melaksanakan pendataan, pengkajian dengan melibatkan tim terkait, serta penyebarluasan informasi terhadap tanaman asli Indonesia yang dapat digunakan sebagai obat dalam rangka pengembangan obat asli Indonesia;
- h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan serta penyiapan data/bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

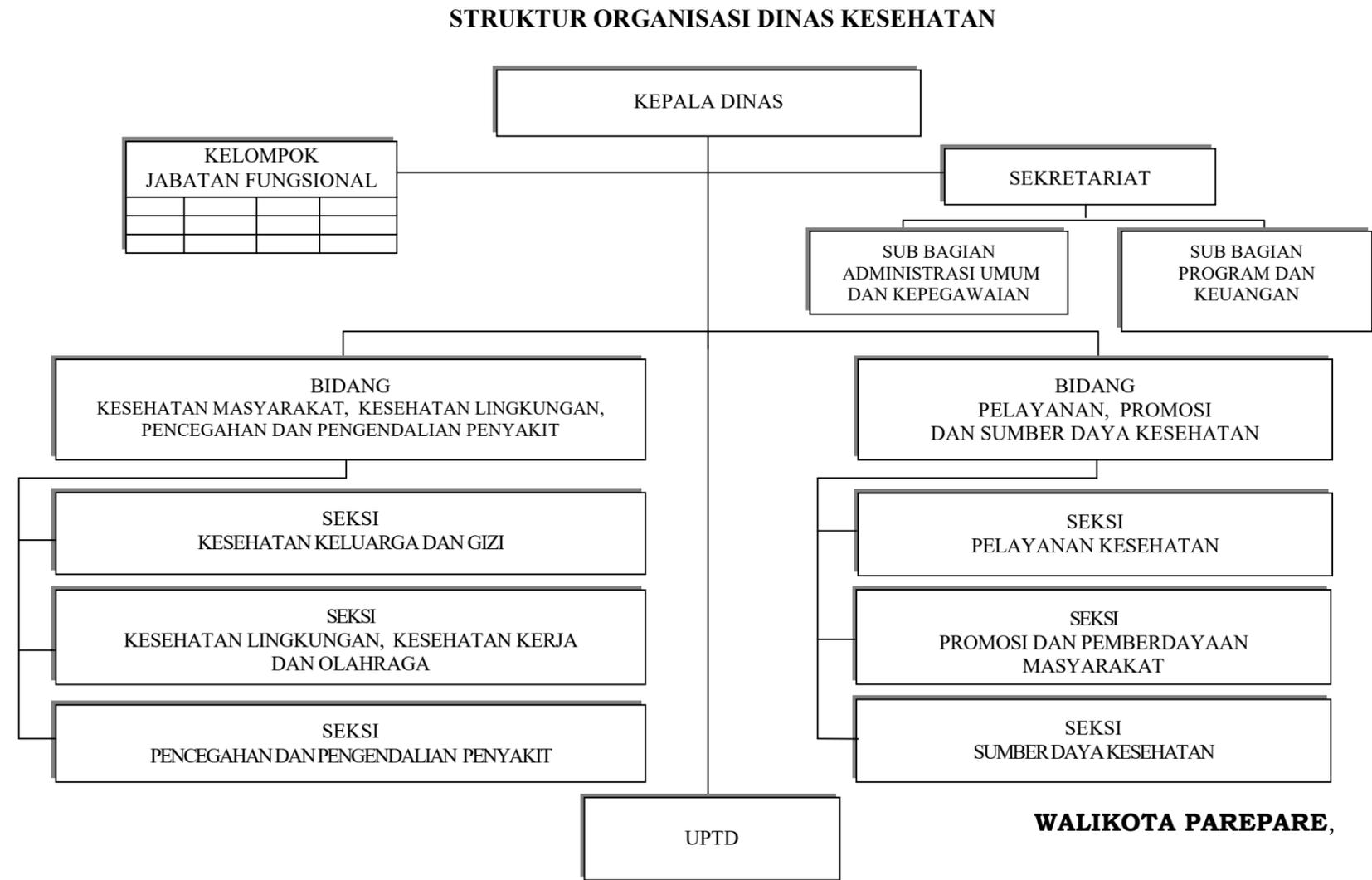
Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 maka bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**  
**Kota Parepare**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR : 53 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016



**WALIKOTA PAREPARE,**

**TAUFAN PAWE**

## 2.2 . Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Parepare

Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, sarana dan prasarana serta obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya tersebut sebagai input dalam melaksanakan tugasnya.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan dalam hal di Dinas Kesehatan Kota Parepare sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 708 orang yang tersebar di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

Jika diukur berdasarkan jumlah, jenis dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kota Parepare yang berjumlah 142.097 jiwa pada tahun 2017, maka tenaga kesehatan di Kota Parepare sudah ada yang berlebih dan ada yang kekurangan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2017

NO	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga (Standar Nasional 2015)Per 100.000 penduduk	Jumlah tenaga sesuai Rasio	Kekurangan/ kelebihan
1	Dokter Spesialis	50	10,2	35,19	-24,99
2	Dokter Umum	87	41	61,23	-20,23
3	Perawat	473	162,4	332,87	-170,47
4	Bidan	113	104	79,52	24,48

Dan jika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat maka kondisi ketenagaan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Kondisi Ketenagaan Puskesmas (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Parepare  
Tahun 2017

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH PUSKESMAS	STANDAR	KONDISI SEKARANG	KEKURANGAN (-)/ KELEBIHAN (+)
1	Dokter atau dokter layanan primer	6 Puskesmas Rawat Inap	12	10	-2
2	Dokter Gigi		6	13	+7
3	Perawat		48	112	+64
4	Bidan		42	42	0
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat		12	21	+9
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan		6	9	+3
7	Ahli Teknologi laboratorium medik		6	7	+1
8	Tenaga Gizi		12	14	+2
9	Tenaga Kefarmasian		12	18	+6
10	Tenaga Administrasi		18	8	-10
11	Pekarya		12	3	-9

Kondisi diatas merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik dan kondisi tersebut belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Kelurahan.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kota Parepare dilengkapi dengan fasilitas berupa tanah, gedung serta peralatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jenis dan Nilai peralatan Dinas Kesehatan Kota Parepare  
Tahun 2017

NO	JENIS FASILITAS	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	TANAH	6.247.936.902	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Parepare, Instalasi Farmasi dan Puskesmas
2	PERALATAN DAN MESIN	85.032.138.019	
	a. Alat-Alat Besar Darat	212.127.960	
	b. Alat-Alat Bantu	170.460.450	
	c. Alat Angkutan Darat Bermotor	11.727.447.904	
	d. Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3.250.000	
	e. Alat Angkut Apung Bermotor	82.000.000	
	f. Alat Ukur	20.000.000	
	g. Alat Kantor	3.472.413.113	
	h. Alat Rumah Tangga	1.589.712.732	
	i. Komputer	3.533.307.804	
	j. Alat Studio	173.449.498	
	k. Alat Komunikasi	57.150.000	
	l. Alat Kedokteran	11.436.401.513	
	m. Alat Kesehatan	45.864.941.756	
	n. Unit-Unit Laboratorium	6.689.475.284	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	47.170.143.740	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.528.632.748	
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.641.510.992	
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	2.223.727.226	
	a. Jembatan	288.000.000	
	b. Bangunan Air Bersih/Baku	874.268.571	
	c. Instalasi Air Minum Bersih	210.308.655	
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaa	63.847.208.101	
6	ASET LAINNYA	191.174.824	

Sampai dengan tahun 2017 di Kota Parepare terdapat sarana kesehatan antara lain : 3 unit Rumah Sakit, 1 Unit Rumah Sakit Khusus, 6 unit Puskesmas Rawat Inap yang tersebar disetiap wilayah kecamatan, 2 unit Rumah Bersalin, 1 unit Rumah Sakit Bersalin, 6 Unit Balai Pengobatan Klinik, Dan juga didukung dengan Puskesmas Pembantu sebanyak 21 unit

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber

daya yang ada termasuk yang ada dimasyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Poskeskel, Kelurahan Siaga, Posbindu, Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja) dan lain-lain.

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal dimasyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Adapun jumlah Posyandu yang ada di Kota Parepare pada tahun 2017 adalah 125 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yakni 22 kelurahan, maka rasio Posyandu terhadap kelurahan adalah 5,68 artinya hampir disetiap kelurahan memiliki 5 unit Posyandu.

Poskeskel adalah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk juga keluarga berencana. Sampai tahun 2017 Poskeskel yang ada di Kota Parepare berjumlah 6 unit. Sedangkan Posbindu adalah kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan. Manfaat atau tujuan dari Posbindu umumnya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan hidup bagi mereka yang sudah berumur, termasuk juga lansia dan lebih dikedepankan terhadap kontrol PTM (Penyakit Tidak Menular). Kegiatan yang biasa dilakukan pada kegiatan Posbindu adalah pemeriksaan fisik mulai dari urin, darah, berat badan, tinggi badan. Jika ada keluhan maka bisa dirujuk ke Puskesmas. Adapun jumlah Posbindu di Kota Parepare tahun 2017 adalah sebanyak 5 unit.

### 2.2.3. Pembiayaan Kesehatan

Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare bersumber dari APBD Kota Parepare dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4  
Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare  
Tahun 2013-2017

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				JUMLAH ANGGARAN
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
2013	18.803.677.000	741.800.000	11.001.685.739	3.617.416.700	15.360.902.439	34.164.579.439
2014						
2015	22.877.936.500	563.395.000	23.798.500.040	67.051.296.240	91.413.191.280	114.291.127.780
2016	24.004.411.000	762.940.000	52.315.856.048	66.324.663.820	119.403.459.868	143.407.870.868
2017	24.848.682.000	1.000.130.000	45.631.672.634	47.897.897.670	94.529.700.304	213.908.082.608

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2014 dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan dana transfer dari BPJS. (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus dianggarkan di APBD. Adapun dana tersebut merupakan dana transfer dari BPJS ke rekening masing-masing Puskesmas dan langsung digunakan oleh Puskesmas tersebut dengan mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Dan juga sejak tahun 2016 dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah berubah menjadi Dana Alokasi Khusus sehingga anggarannya sudah langsung dianggarkan di DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare.

### 2.3 . Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare berkaitan dengan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, sarana dan prasarana dan sumber daya kesehatan termasuk pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator. Adapun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini .:

**TABEL 2.5**  
**KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE**  
**TAHUN 2013 - 2017**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-														
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017										
1	Angka kelangsungan hidup bayi			965	991	Bayi	992	Bayi	993	Bayi	994	Bayi	995	Bayi	991	Bayi	981	Bayi	992	Bayi	986	Bayi	986	Bayi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Angka usia harapan hidup				74,72	Tahun	74,8	Tahun	74,85	Tahun	74,9	Tahun	74,95	Tahun	70,38	Tahun	70,39	Tahun	70,59	Tahun	70,64	Tahun	70,64	Tahun	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3	Persentase balita gizi buruk				0,09	%	0,22	%	0,17	%	0,05	%	0,04	%	0,09	%	0,22	%	0,11	%	0,05	%	0,04	%	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0
4	Rasio posyandu per satuan balita				9,09	per 1000 bayi	9,09	per 1000 bayi	9,09	per 1000 bayi	9,33	per 1000 bayi	9,33	per 1000 bayi	17,41	per 1000 bayi	20,68	per 1000 bayi	19,74	per 1000 bayi	13,97	per 1000 bayi	12,68	per 1000 bayi	1,9	2,3	2,2	1,5	1,4
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, persatuan penduduk				0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,4	per 1000 pddk	0,21	per 1000 pddk	0,25	per 1000 pddk	0,25	per 1000 pddk	0,23	per 1000 pddk	0,23	per 1000 pddk	1,1	1,3	1,3	1,2	0,6
6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk				0,04	per 1000 pddk	0,04	per 1000 pddk	0,04	per 1000 pddk	0,04	per 1000 pddk	0,06	per 1000 pddk	0,05	per 1000 pddk	0,07	per 1000 pddk	0,06	per 1000 pddk	0,04	per 1000 pddk	0,05	per 1000 pddk	1,3	1,8	1,5	1,0	0,8
7	Rasio dokter per satuan penduduk				0,05	per 1000 pddk	0,05	per 1000 pddk	0,05	per 1000 pddk	0,05	per 1000 pddk	0,04	per 1000 pddk	0,63	per 1000 pddk	0,67	per 1000 pddk	0,66	per 1000 pddk	0,55	per 1000 pddk	0,61	per 1000 pddk	12,6	13,4	13,2	11,0	15,3
8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk				0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	0,2	per 1000 pddk	3,48	per 1000 pddk	4,84	per 1000 pddk	4,78	per 1000 pddk	3,18	per 1000 pddk	3,12	per 1000 pddk	17,4	24,2	23,9	15,9	15,6
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				67,4	%	71,1	%	78,2	%	80	%	85	%	69,11	%	61,11	%	28,78	%	100	%	100	%	1,0	0,9	0,4	1,3	1,2
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				96,1	%	93,6	%	96,7	%	98	%	99	%	100	%	66,07	%	51,78	%	95,46	%	100	%	1,0	0,7	0,5	1,0	1,0
11	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	76,53	%	87,15	%	91,03	%	102,4	%	100	%	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				75	%	81,4	%	90	%	65	%	60	%	122,38	%	73	%	64,78	%	44,47	%	98,35	%	1,6	0,9	0,7	0,7	1,6
16	Cakupan kunjungan bayi				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	99,96	%	99,25	%	88,73	%	97,44	%	98,91	%	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
<b>A</b>	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>																												
1	Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar			80	80	%	83	%	85	%	90	%	95	%	82	%	82	%	83	%	83	%	84	%	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
2	Persentase ketersediaan bahan medis habis pakai			80	80 %	83 %	85 %	90 %	95 %	80 %	80 %	82 %	82 %	83 %	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
3	Persentase sarana pelayanan farmasi, IRTP dan obat tradisional yang memenuhi syarat kesehatan				70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	70 %	72 %	73 %	74 %	75 %	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
4	Persentase penggunaan antibiotik di sarana pelayanan kesehatan dasar				56 %	55,7 %	49,3 %	48,7 %	45 %	55 %	55 %	54 %	54 %	53 %	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
<b>B PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																			
1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat				46,6 %	45,1 %	42 %	43,6 %	45,3 %	43 %	43 %	44 %	45 %	45 %	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas akreditasi				1 kec	1 kec	1 kec	3 kec	4 kec	0 kec	0 kec	1 kec	3 kec	4 kec	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>C PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																			
1	Cakupan rumah tangga keluarga sehat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %	85 %	42 %	66 %	49 %	0,8	0,9	0,4	0,7	0,5
2	Cakupan poskeskel aktif				15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	50 %	55 %	50 %	27 %	3,3	2,5	2,2	1,7	0,7
3	Cakupan posyandu aktif				95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
4	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi				25 %	25 %	25 %	50 %	50 %	0 %	25 %	25 %	25 %	25 %	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5
5	Cakupan balita mendapatkan kapsul Vitamin A				75,5 %	80 %	85 %	90 %	95 %	92 %	100 %	93 %	72 %	93 %	1,2	1,3	1,1	0,8	1,0
6	Cakupan ibu nifas mendapatkan kapsul Vitamin A				75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	99,87 %	100 %	99,92 %	99,89 %	99,02 %	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
7	Cakupan pemberian ASI Eksklusif			90	25 %	25 %	39 %	42 %	44 %	29 %	71 %	82 %	62 %	29 %	1,2	2,8	2,1	1,5	0,7
8	Cakupan gizi kurang yang mendapatkan PMT				75 %	75 %	80 %	85 %	90 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
9	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium				90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	92 %	94 %	94 %	95 %	95 %	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
10	Persentase pasien mendapatkan pelayanan gizi melalui proses PAGT				1 %	5 %	10 %	15 %	20 %	0 %	5 %	5 %	7 %	10 %	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5
<b>D PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>																			
1	Persentase kelurahan STBM			100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68 %	68 %	68 %	100 %	100 %	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0
2	Cakupan sarana air minum yang				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	%	%	83 %	100 %	99 %			0,8	1,0	1,0



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
G	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>																		
1	Angka kematian ibu			102	272 per 100000 KH	237 per 100000 KH	202 per 100000 KH	167 per 100000 KH	132 per 100000 KH	301 per 100000 KH	0 per 100000 KH	215 per 100000 KH	230 per 100000 KH	179 per 100000 KH	1,1	0,0	1,1	1,4	1,4
2	Angka kematian bayi			35	9 per 1000 KH	9 per 1000 KH	8 per 1000 KH	7 per 1000 KH	6 per 1000 KH	9 per 1000 KH	19 per 1000 KH	8 per 1000 KH	14 per 1000 KH	8 per 1000 KH	1,0	2,1	1,0	2,0	1,3

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana  $AKBH=1-\text{Angka Kematian Bayi}$ . Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari Tabel 2.5, nampak bahwa angka kelangsungan hidup bayi selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2017, menunjukkan angka kematian bayi terkecil, angka kematian bayi tertinggi yaitu di tahun 2014 mencapai angka 19 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dengan angka kelangsungan hidup bayi 981. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan angka kematian bayi menjadi angka 8 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah 992. Berdasarkan batasan Capaian Indikator SDGs Angka Kematian Bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1000 kelahiran hidup (angka kelangsungan hidup bayi 965). Ini berarti meskipun terjadi peningkatan angka kematian bayi namun AKB Kota Parepare selama kurun waktu lima tahun masih berada dibawah 35. Dengan demikian AKB yang rendah tersebut secara tidak langsung mempengaruhi AKHB yang setiap tahunnya terus meningkat.

### 2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013 hingga 2016, Kota Parepare telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,26 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Angka Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,08 persen per tahun. Pada tahun 2013, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Parepare sebesar 70,38 tahun, dan pada tahun 2016 telah mencapai 70,64 tahun. Dari Tabel 2.5 terlihat bahwa perkembangan usia harapan hidup Kota Parepare selama kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan. Selanjutnya dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan masih diatas rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan dibandingkan dengan Nasional, maka capaian tersebut masih di bawah rata-rata nasional

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Jumlah balita gizi buruk di Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 berfluktuasi namun menurun drastis di tahun 2017. Ini berarti telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam menekan jumlah balita yang menderita gizi buruk.

#### 4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2013-2017 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Kota Parepare relative meningkat. Pada tahun 2013, jumlah posyandu sebanyak 120 unit, meningkat menjadi 125 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2013 sebanyak 6.892 jiwa, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 9.855 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2013 adalah 17,41 turun menjadi 12,68 di tahun 2017.

#### 5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Kota Parepare mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Parepare yaitu berupa Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu di tahun 2013 sebanyak 29 unit dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 33 unit dengan Rasio masing-masing sebesar di tahun 2013 adalah 0,21 dan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,23.

#### 6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kota Parepare dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Pada tahun 2013, jumlah Rumah Sakit sebanyak 7 unit dan pada tahun 2017 jumlah rumah sakit tetap 7 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi yang rendah.

#### 7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk di Kota Parepare yaitu pada tahun 2013 jumlah dokter 85 orang dengan rasio 0,63 persen dan pada tahun 2016 jumlah dokter meningkat menjadi 87 orang dokter dengan rasio 0,61 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2013-2017 belum sebanding dengan penambahan penduduk

#### 8. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kota Parepare selama kurun waktu 2013-2017 mengalami penurunan yaitu dari 470 orang pada tahun 2013 menjadi 456 orang pada tahun 2017. penurunan jumlah tenaga medis tersebut tidak terlalu mempengaruhi naik turunnya rasio tenaga medis persatuan penduduk dari 3,48 persen pada tahun 2013 menjadi 3,12 persen ditahun 2017 yang artinya setiap satu tenaga medis melayani 1 sampai 3 orang pasien perharinya.

#### 9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan kasus komplikasi kebidanan berdasarkan tahun 2013, menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive sebanyak 345 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 69,11 persen, sementara pada tahun 2017 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive 387 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu di Kota Parepare sudah tertangani dengan baik.

#### 10. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Parepare yaitu 92,43 persen pada tahun 2013 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.307 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 100 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.621 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Parepare sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

#### 11. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization di Kota Parepare tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah 22 kelurahan dari 22 kelurahan dan cakupan kelurahan UCI yaitu 100 persen. Sementara pada tahun 2016, jumlah desa/kelurahan UCI yaitu 22 kelurahan dari cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan kelurahan yang berada pada Kota Parepare mencapai UCI.

#### 12. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Parepare yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

#### 13. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Kota Parepare pada tahun 2013 sebanyak 277, sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 212 penderita. Kemudian pada tahun 2016 jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) berjumlah 298 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan berjumlah 294 penderita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat dari 76,53 persen pada tahun 2013 menjadi 100 persen di tahun 2017. Peningkatan tersebut telah memenuhi target angka keberhasilan penyembuhan TBC (Success Rate/SR).

#### 14. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 148 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 148 kasus. Pada tahun 2017, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 172 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mencapai 100 persen, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100 persen.

#### 15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditahun 2013 sebanyak 39.969 jiwa terlayani dari 32.661 jiwa penduduk miskin di Kota Parepare atau sama dengan 122,38 persen yang artinya terdapat beberapa rujukan pasien miskin dari daerah tetangga untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan ditahun 2014 mengalami peningkatan dari 73,00 persen menjadi 98,35 persen di tahun 2017.

#### 16. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 jumlah kunjungan sebanyak 32.326 bayi dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 2.460 kunjungan. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 adalah 99,96 persen

dan pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi turun menjadi menjadi 98,91 persen

#### 17. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi di Kota Parepare dari tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuatif. Angka Kematian Bayi terendah pada Tahun 2015 dan 2017 yakni 8, sedangkan Angka kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni 19. Berdasarkan batasan Capaian Indikator SDGs Angka Kematian Bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1000 kelahiran hidup. Ini berarti meskipun terjadi peningkatan angka kematian bayi namun AKB Kota Parepare selama kurun waktu lima tahun masih berada dibawah 35

#### 18. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian Ibu di Kota Parepare dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Tahun 2013 Angka Kematian Ibu adalah 301 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2017 menjadi 179 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi angka ini belum mencapai target Global SDGs yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup

#### 19. Persentase Ketersediaan Jenis Obat Generik dan Esensial untuk Pelayanan Kesehatan Dasar

Persentase Ketersediaan Jenis Obat Generik dan Esensial untuk Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jumlah persentase obat dari jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di puskesmas terhadap jumlah total item obat indikator yang ada di semua puskesmas. Persentase ketersediaan obat dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan tetapi dari 82 % di tahun 2013 menjadi 84 % di tahun 2017.

#### 20. Persentase Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai

Persentase Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai untuk Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jumlah persentase bahan medis habis pakai dari jumlah kumulatif item bahan medis habis pakai yang tersedia di puskesmas terhadap jumlah total item bahan medis habis pakai indikator yang ada di semua puskesmas. Persentase ketersediaan habis medis habis pakai dari

tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan dari 80 % di tahun 2013 menjadi 83 % di tahun 2017.

#### 21. Persentase Sarana Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase Sarana Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat kesehatan adalah persentase Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat kesehatan terhadap jumlah total Sarana Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional di suatu wilayah tertentu. Persentase Sarana Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat kesehatan adalah persentase Pelayanan Farmasi, IRTP dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2013 yakni 70 % menjadi 75 % di tahun 2017.

#### 22. Persentase Penggunaan Antibiotik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Persentase Penggunaan Antibiotik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah persentase jumlah item obat antibiotik yang diresepkan terhadap total item obat keseluruhan yang diresepkan. Persentase penggunaan antibiotik dari tahun 2013 - 2017 mengalami penurunan dari 55 % menjadi 53 %. Penurunannya tidak signifikan, ini mengindikasikan penggunaan obat antibiotik kepada pasien perlu diperhatikan, karena konsumsi antibiotik tanpa ada edukasi yang baik kepada pasien, maka berakibat pada tidak efektifnya pengobatan akibat dari adanya resistensi kuman terhadap obat antibiotik.

#### 23. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat adalah persentase penduduk yang terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan dasar terhadap jumlah penduduk pada periode yang sama. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat dari tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan dari 43 % menjadi 45 %. Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di dominasi oleh peserta BPJS baik untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

#### 24. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas terakreditasi

Puskesmas di Kota Parepare mulai terakreditasi pada tahun 2015 dan 2016. Jumlah puskesmas yang terakreditasi adalah 6 Puskesmas. Jadi secara keseluruhan semua puskesmas di Kota Parepare telah terakreditasi sejak tahun 2016 dengan masa berlaku akreditasi adalah 3 tahun. Hal ini

sudah mencapai target yakni telah melewati jumlah minimal puskesmas terakreditasi di tiap kecamatan yaitu 1 (satu) puskesmas terakreditasi.

#### 25. Cakupan Rumah Tangga Keluarga Sehat

Cakupan rumah tangga keluarga sehat adalah persentase jumlah rumah tangga keluarga yang melakukan PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) terhadap jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS. Berdasarkan Tabel 2.5 tampak bahwa Cakupan rumah tangga keluarga sehat dari tahun 2013 – 2017 trendnya turun. Di tahun 2013 mencapai 82 %, dan di tahun 2014 meningkat menjadi 85 %. Pada Tahun 2015, cakupan rumah tangga keluarga sehat turun signifikan menjadi 42 %, dan kemudian kembali naik di tahun 2016 menjadi 66 %. Kenaikan ini tidak bisa menyamai angka cakupan tahun 2014. Hingga akhirnya pada tahun 2017 cakupan rumah tangga keluarga sehat kembali turun menjadi 49 %. Sehingga bila ditarik data dari tahun 2013 ke tahun 2017, cakupan rumah tangga keluarga sehat menurun fluktuatif dari 82 % menjadi 49 %. Penurunan ini disebabkan karena masih banyak rumah tangga yang belum memenuhi indikator PHBS seperti bayi diberi ASI eksklusif, melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok.

#### 26. Cakupan Poskeskel Aktif

Cakupan poskeskel aktif adalah persentase jumlah poskeskel yang ada terhadap jumlah kelurahan di suatu wilayah tertentu. Jumlah poskeskel pada tahun 2013 ada 11 Poskeskel, dan bertambah 1 (satu) pada tahun 2015 menjadi 12 Poskeskel, dan akhirnya pada tahun 2017 jumlahnya menurun menjadi 6 Poskeskel. Sehingga jumlah poskeskel yang aktif dari tahun 2013 – 2017 turun dari 50 % menjadi 27 %.

#### 27. Cakupan Posyandu Aktif

Cakupan posyandu aktif adalah persentase jumlah posyandu yang beroperasi terhadap jumlah posyandu di suatu wilayah tertentu pada periode yang sama. Cakupan posyandu aktif pada tahun 2013 adalah 108 posyandu dari 120 total posyandu, sehingga cakupan posyandu pada tahun tersebut mencapai 90 %. Cakupan tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2014. Pada tahun 2015 cakupan posyandu aktif mencapai 100 % dengan jumlah posyandu aktif 123 posyandu dari 123 total posyandu. Kemudian angka cakupan yang mencapai 100 % ini dapat dipertahankan pada tahun 2016 dan pada tahun 2017.

## 28. Cakupan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Cakupan kecamatan bebas rawan gizi adalah persentase kecamatan dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita <15 % pada kurun waktu tertentu. Jumlah Balita BGM (Bawah Garis Merah) di Kota Parepare pada tahun 2013 sebanyak 110 balita, dan pada tahun 2014, turun menjadi 101 balita. Pada tahun 2016 Jumlah Balita BGM meningkat menjadi 219 Balita, dan kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 meningkat lagi menjadi 302 Balita. Jumlah Balita BGM ini masih dibawah <15 %, ini menandakan bahwa Kota Parepare memiliki kecamatan yang masuk kategori bebas rawan gizi.

## 29. Cakupan Balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A

Cakupan Balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A adalah persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A terhadap jumlah keseluruhan Balita di suatu wilayah pada periode yang sama. Jumlah balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada Tahun 2013 adalah 4.711 balita dari total balita sebanyak 5.122, sehingga cakupan balita pada tahun 2013 sebesar 92 %. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 mencapai 99,54 % karena jumlah balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada tahun 2014 adalah 6.304 balita dari total balita sebanyak 6.333. tahun 2015, cakupan balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A turun, tetapi tidak terlalu signifikan yakni turun menjadi 93 %. Kemudian tahun 2016, cakupan balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A turun lagi dengan penurunan yang signifikan menjadi 72 %. Jumlah balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada tahun 2016 sebanyak 6.520 dari total balita sebanyak 9,099 Balita. Pada Tahun 2017 cakupan balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A naik menjadi 93 % dengan jumlah balita yang mendapatkan Kapsul Vitamin A sebanyak 7.629 dari total balita sebanyak 8.185 balita

## 30. Cakupan Ibu Nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A

Cakupan ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A adalah persentase ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A terhadap jumlah keseluruhan ibu nifas di suatu wilayah pada periode yang sama. Jumlah ibu yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada Tahun 2013 adalah 1.498 ibu nifas dari total ibu nifas sebanyak 1.500, sehingga cakupan ibu nifas pada tahun 2013 sebesar 99,87 %. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 mencapai 100 % karena jumlah ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada tahun 2014 adalah 914 ibu nifas dari total ibu nifas sebanyak 914. tahun 2015, cakupan ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A mencapai 99,92 %. Kemudian tahun 2016, cakupan ibu nifas yang

mendapatkan Kapsul Vitamin A mencapai 99,89 %. Jumlah ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A pada tahun 2016 sebanyak 2.606 dari total ibu nifas sebanyak 2.609 Ibu nifas. Pada Tahun 2017 cakupan ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A mencapai 99,02 % dengan jumlah ibu nifas yang mendapatkan Kapsul Vitamin A sebanyak 2.737 dari total ibu nifas sebanyak 2.764 ibu nifas

### 31. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif

Cakupan pemberian ASI Eksklusif adalah persentase jumlah bayi yang diberi ASI selama 24 jam terakhir terhadap total jumlah bayi. Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 -2017 masih sangat rendah dari target nasional yaitu 90 %. Tahun 2013 jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 455 bayi dari total bayi sebanyak 1.591 bayi sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 sebesar 29 %. Tahun 2014, cakupan pemberian ASI Eksklusif mengalami peningkatan menjadi 71 %. Pada tahun 2014 jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah 654 bayi dari total bayi sebanyak 926 bayi. Kemudian pada tahun 2015, jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 2.024 bayi dari total bayi sebanyak 2.469 bayi sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi menjadi 82 %. Pada tahun 2016, cakupan pemberian ASI Eksklusif mengalami penurunan menjadi 62 %, pada saat itu jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 1.603 bayi dari total bayi sebanyak 2.600 bayi. Kemudian pada tahun 2017, jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 785 dari total bayi sebanyak 2738 sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 29 % di tahun 2017.

### 32. Cakupan Gizi Kurang yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

Cakupan gizi kurang yang mendapatkan PMT adalah persentase anak balita yang mengalami gizi kurang (penurunan berat badan) yang diberikan PMT terhadap total anak balita yang mengalami gizi kurang. Jumlah Balita gizi kurang di Kota Parepare 2013 sebanyak 110 balita, dan pada tahun 2014, turun menjadi 101 balita. Pada tahun 2016 Jumlah Balita gizi kurang meningkat menjadi 219 Balita, dan kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 meningkat lagi menjadi 302 Balita. Cakupan gizi kurang yang mendapatkan PMT dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan dari 80 % menjadi 90 %.

### 33. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium

Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium adalah persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium terhadap total rumah tangga yang terpantau. Pada Tahun 2013 jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 453 rumah tangga dari total rumah tangga yang terpantau sebesar 492, sehingga cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 92 %. Kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 94 %, pada tahun tersebut jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 559 rumah tangga dari total rumah tangga yang terpantau sebesar 595 rumah tangga. Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 4.345 rumah tangga dari total rumah tangga yang terpantau sebesar 4.662, sehingga cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium pada tahun 2015 sebesar 94 %. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 95 %, pada tahun tersebut jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 5.383 dari total rumah tangga yang terpantau adalah 5.666 rumah tangga. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 4.389 dari total rumah tangga yang terpantau sebesar 4.620 rumah tangga, sehingga cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium pada tahun 2017 adalah 95 %

34. Persentase pasien mendapatkan pelayanan gizi melalui Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Persentase pasien mendapatkan pelayanan gizi melalui Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah persentase pasien yang mendapatkan pelayanan gizi PAGT terhadap jumlah pasien rawat inap yang memiliki masalah gizi yang dilaporkan. Persentase pasien mendapatkan pelayanan gizi melalui Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) pada tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari 5 % menjadi 10 % .

35. Persentase Kelurahan STBM

Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah kelurahan yang komunitasnya melakukan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan sehingga menghasilkan kondisi tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, serta mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Jumlah kelurahan di Wilayah Kota Parepare adalah 22 kelurahan, pada tahun 2013 sampai 2015 jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 15 kelurahan atau 68 persen. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 persentase kelurahan

yang melaksanakan STBM menjadi 100 %, ini artinya bahwa seluruh kelurahan di Kota Parepare telah melaksanakan STBM.

36. Cakupan sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat kesehatan terhadap jumlah sampel air yang diperiksa pada periode yang sama. Pada tahun 2015 jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat adalah 51 sampel dari total sampel air minum yang diperiksa sebesar 61 sampel, sehingga cakupan sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan adalah 84 %. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 100 %, yang jumlah sampel air minum yang diperiksa semua memenuhi syarat kesehatan sebesar 71 sampel. Pada tahun 2017 jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat adalah 1.176 sampel dari total sampel air minum yang diperiksa sebesar 1.179 sampel, sehingga cakupan sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan adalah 99,74 %

37. Cakupan TPM (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan

Cakupan TPM (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan adalah persentase jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan terhadap jumlah TPM yang diperiksa. Pada tahun 2013, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 230 TPM dari 230 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2013 adalah 100 %. Pada tahun 2014, cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah 100 %, pada tahun tersebut jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 230 TPM dari 230 TPM yang diperiksa. Pada tahun 2015, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 190 TPM dari 190 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah 100 %. Pada tahun 2016, cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah 100 %, pada tahun tersebut jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 190 TPM dari 190 TPM yang diperiksa. Pada tahun 2017, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 184 TPM dari 205 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan turun menjadi 90 %.

38. Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat kesehatan

Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat kesehatan adalah persentase jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan terhadap jumlah TPM yang diperiksa. Pada tahun 2013, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 579 TPM dari 657 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2013 adalah 88 %. Pada tahun 2014, cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah 88 %, pada tahun tersebut jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 579 TPM dari 657 TPM yang diperiksa. Pada tahun 2015, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 217 TPM dari 260 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83 %. Pada tahun 2016, cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah 83 %, pada tahun tersebut jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 217 TPM dari 260 TPM yang diperiksa. Pada tahun 2017, jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 260 TPM dari 411 TPM yang diperiksa, sehingga cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan turun menjadi 63 %.

39. Cakupan RT (Rumah Tangga) yang memenuhi syarat sanitasi

Cakupan RT (Rumah Tangga) yang memenuhi syarat sanitasi adalah persentase jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi terhadap jumlah RT yang diperiksa. Pada tahun 2013, jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 1.141 RT dari 1.830 RT yang diperiksa, sehingga cakupan RT yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2013 adalah 62 %. Pada tahun 2014, cakupan RT yang memenuhi syarat sanitasi mengalami peningkatan menjadi 69 %, pada tahun tersebut jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 1.761 RT dari 2.550 RT yang diperiksa. Pada tahun 2015, jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 1.978 RT dari 2.824 RT yang diperiksa, sehingga cakupan RT yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 70 %. Pada tahun 2016, cakupan RT yang memenuhi syarat sanitasi kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 78 %, pada tahun tersebut jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 1.426 RT dari 1.826 RT yang diperiksa. Pada tahun 2017, jumlah RT yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 2.665 RT dari 3.418 RT yang diperiksa, sehingga cakupan RT yang memenuhi syarat sanitasi tetap yakni 78 %.

#### 40. Cakupan Fasyankes dengan pengelolaan limbah medis memenuhi syarat

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Parepare terdiri atas puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan rumah sakit. Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu serta poliklinik dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan khususnya pada puskesmas pembantu dan poliklinik. Akan tetapi untuk rumah sakit dari tahun 2013 – 2017 jumlahnya fluktuatif. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki pengelolaan limbah medis memenuhi syarat sehingga cakupan fasyankes dengan pengelolaan limbah medis memenuhi syarat pada dari tahun 2013 – 2017 adalah 100 %.

#### 41. Persentase pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan

Persentase pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan adalah persentase pekerja yang melakukan kunjungan ke puskesmas dan atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan terhadap total penduduk bekerja pada periode yang sama. Pada tahun 2013, jumlah pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebanyak 12.768 pekerja dari 51.070 pekerja, sehingga persentase pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2013 adalah 25 %. Pada tahun 2014, persentase pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan mengalami peningkatan menjadi 27 %, pada tahun tersebut jumlah pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebanyak 14.799 pekerja dari 54.812 pekerja. Pada tahun 2015, jumlah pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebanyak 16.380 pekerja dari 54.599 pekerja, sehingga cakupan pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 30 %. Pada tahun 2017, jumlah pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebanyak 25.477 pekerja dari 63.693 pekerja, sehingga cakupan pekerja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan kembali meningkat menjadi 40 %.

#### 42. Insiden Rate DBD

Insiden Rate DBD adalah perbandingan antara suatu kejadian DBD dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut, menyangkut interval waktu tertentu. Rata-rata Insiden Rate DBD dari Tahun 2013 – 2017 cukup tinggi karena melebihi indikator nasional tahun 2015 yaitu 50/100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah kasus DBD sebanyak 192 kasus, sehingga Insiden Rate DBD pada tahun 2013 adalah 146,27/100.000 penduduk. Pada tahun 2014, Insiden Rate DBD menurun sangat signifikan yakni 6,78/100.000 penduduk, karena jumlah kasus DBD pada tahun tersebut hanya 9 kasus. Kemudian pada tahun 2015, jumlah

kasus DBD meningkat menjadi 149 kasus, sehingga Insiden Rate DBD menjadi 108,84/100.000 penduduk. Tahun 2016, jumlah kasus DBD meningkat lagi menjadi 172 kasus, sehingga Insiden Rate DBD menjadi 124,01/100.000 penduduk. Kemudian tahun 2017, Insiden Rate DBD menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 96,14/100.000 penduduk, yang pada tahun tersebut jumlah kasus DBD sebanyak 135 kasus.

#### 43. Prevalensi Kasus HIV

Prevalensi kasus HIV adalah jumlah kasus penyakit HIV pada satu waktu tertentu, dihubungkan dengan besar populasi darimana kasus berasal. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV adalah 13 kasus, sehingga prevalensi kasus HIV pada tahun 2015 sebesar 0,099 per 1000 populasi. Pada tahun 2014, prevalensi kasus HIV sebesar 0,098 per 1000 populasi, yang jumlah kasus HIV pada tahun tersebut adalah 13 kasus. Jumlah kasus HIV pada tahun 2015 meningkat menjadi 30 kasus, sehingga prevalensi kasus HIV menjadi 0,219 per 1000 populasi. Pada tahun 2016, prevalensi kasus HIV menurun menjadi 0,05 per 1000 populasi karena jumlah kasus HIV pada tahun tersebut berjumlah 7 kasus. Dan pada tahun 2017, jumlah kasus HIV meningkat menjadi 45 kasus sehingga prevalensi kasus HIV menjadi 0,32 per 1000 populasi. Prevalensi kasus HIV di Parepare bukan tergolong rendah karena rata-rata prevalensi HIV diatas 0,05 per 1000 populasi dan jumlah kasus HIV di parepare dari tahun 2013 – 2017 meningkat secara signifikan.

#### 44. Cakupan Penanganan Penyakit Pneumonia

Cakupan penanganan penyakit pneumonia pada balita adalah persentase balita terdiagnosa penyakit pneumonia yang ditangani terhadap jumlah balita terdiagnosa pneumonia dalam periode yang sama. Jumlah kasus pneumonia pada balita yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2013 sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2014, jumlah kasus pneumonia yang ditemukan dan ditangani turun menjadi 10 kasus. Kemudian tahun 2015, jumlah kasus pneumonia pada balita yang ditemukan dan ditangani kembali turun menjadi 6 kasus. Pada tahun 2017, jumlah kasus pneumonia pada balita yang ditemukan dan ditangani meningkat menjadi 65 kasus. Cakupan penanganan penyakit pneumonia dari tahun 2013 – 2017 adalah 100 % karena apabila ada ditemukan kasus pneumonia pada balita maka balita yang bersangkutan langsung ditangani oleh tenaga kesehatan.

#### 45. Cakupan Penanganan CFR Diare pada KLB (Kejadian Luar Biasa)

CFR Diare atau Case Fatality Rate merupakan suatu angka yang dinyatakan ke dalam persentase yang berisikan data orang mengalami kematian akibat penyakit Diare pada periode waktu tertentu. Di kota Parepare, selama tahun 2013 – 2017 tidak ada angka kematian akibat KLB Diare. Akan tetapi jumlah kasus diare yang ditangani dari tahun 2013 – 2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2013, jumlah kasus Diare sebanyak 1.741 kasus, sehingga Insiden Rate Diare pada tahun 2013 adalah 13,26/1000 penduduk. Pada tahun 2014, Insiden Rate Diare menurun tapi tidak signifikan yakni 12,43/1000 penduduk, karena jumlah kasus Diare pada tahun tersebut 1.651 kasus. Kemudian pada tahun 2015, jumlah kasus Diare meningkat sangat signifikan menjadi 5.817 kasus, sehingga Insiden Rate Diare menjadi 42,49/1000 penduduk. Tahun 2016, jumlah kasus Diare meningkat lagi menjadi 6.609 kasus, sehingga Insiden Rate Diare menjadi 47,65/1000 penduduk. Kemudian tahun 2017, Insiden Rate Diare naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 21,29/1000 penduduk, yang pada tahun tersebut jumlah kasus Diare sebanyak 2.989 kasus.

#### 46. Cakupan Penanganan Wabah pada waktu $\leq$ 24 jam

Penangan wabah terjadi pada tahun 2013 dan 2015, pada tahun 2013, tercatat 2 kejadian wabah yang ditangani pada waktu kurang dari 24 jam dan pada tahun 2015, tercatat 4 kejadian wabah yang juga ditangani kurang dari 24 jam. Salah satu penyakit yang menjadi wabah pada tahun 2015 adalah campak, karena jumlah kasus pada waktu adalah 200 kasus, padahal tahun sebelumnya yakni tahun 2014 hanya 17 kasus. Cakupan penanganan wabah pada waktu  $\leq$  24 jam pada tahun 2013 dan 2015 adalah 100 %.

#### 47. Cakupan Pelayanan Calon Jemaah Haji

Cakupan pelayanan calon jemaah dari tahun 2013 – 2017 adalah 100%, karena setiap calon jemaah haji diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit di Kota Parepare. Jumlah jemaah haji pada tahun 2013 adalah 95 orang, dan tahun 2014 dan 2015 jumlahnya stagnan sebanyak 97 orang. Pada tahun 2016, jumlah jemaah haji meningkat menjadi 547 orang dan pada tahun 2017, jumlah jemaah haji menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 234 orang.

#### 48. Cakupan Angka Kesembuhan Penyakit TB

Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Angka minimal yang harus dicapai adalah 85 %. Rata-rata angka kesembuhan penyakit TB dari tahun 2013 – 2017 adalah 64 % dan angka ini masih jauh dari angka yang harus dicapai yaitu 85 %. Tahun 2013, jumlah pasien TB yang sembuh adalah 12 pasien dari 23 pasien TB yang diobati sehingga angka kesembuhan adalah 52 %, kemudian pada tahun 2014, angka kesembuhan turun menjadi 24 %, yang jumlah pasien TB yang sembuh pada tahun tersebut adalah 6 pasien dari 25 pasien TB yang diobati. Pada tahun 2015 angka kesembuhan meningkat dan mampu mencapai 86 %, dengan jumlah pasien TB yang sembuh adalah 101 pasien dari 117 pasien TB yang diobati, kemudian tahun 2016, angka kesembuhan turun menjadi 84 % dengan jumlah pasien TB yang sembuh adalah 127 pasien dari 152 pasien TB yang diobati. Pada tahun 2017, jumlah pasien TB yang sembuh adalah 108 pasien dari 143 pasien TB yang diobati, sehingga angka kesembuhan kembali lagi menurun menjadi 76 %.

#### 49. Angka Penemuan Kasus Kusta

Angka penemuan kasus kusta adalah banyaknya jumlah kasus kusta yang telah ditemukan dibandingkan dengan jumlah penderita yang masih diperkirakan pada wilayah tertentu. Rata-rata angka penemuan kasus kusta dari tahun 2013 – 2017 adalah 6,46 per 10.000 penduduk dan angka ini masih jauh dari target yakni <1 per 10.000 penduduk. Tahun 2013, jumlah kasus yang ditemukan adalah 352 kasus (26,82 per 10.000 penduduk), dan tahun berikutnya yakni tahun 2014 jumlah kasus yang ditemukan menurun menjadi 19 kasus (1,43 per 10.000 penduduk). Tahun 2015, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 29 kasus (2,12 per 10.000 penduduk). Tahun 2016, angka penemuan kasus kusta berhasil mencapai target dibawah 1 per 10.000 penduduk yakni 0,72 per 10.000 penduduk, yang jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 10 kasus, akan tetapi pada tahun berikutnya yakni tahun 2017, angka penemuan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,21 per 10.000 penduduk yang jumlah kasus ditemukan sebanyak 17 kasus.

#### 50. Cakupan Posbindu (Pos Pelayanan Terpadu) Penyakit Tidak Menular

Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular secara mandiri dan berkesinambungan. Di Kota Parepare mulai tahun 2016 - 2017, jumlah posbindu yang terbentuk sebanyak 5 posbindu. Cakupan posbindu di Kota Parepare masih sangat rendah, karena belum semua kelurahan di Kota Parepare memiliki posbindu. Cakupan posbindu PTM di Kota Parepare tahun 2016 dan 2017 baru mencapai 23 %.

#### 51. Cakupan deteksi dini kanker payudara dan serviks

Cakupan deteksi dini kanker payudara dan serviks adalah persentase jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara terhadap jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun pada periode yang sama. Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara pada tahun 2015 sebanyak 15 orang (0,08 %), kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,12 % dengan jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara sebanyak 173 orang. Pada tahun 2017, jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara meningkat menjadi 534 orang (2,64 %)

#### 52. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk puskesmas dan jaringannya seperti puskesmas pembantu baik itu dalam bentuk rehab, pemenuhan alat kesehatan dan instalasi listrik dan air dan pemenuhan sarana dan prasarana lainnya dari tahun 2013 – 2017 selalu dianggarkan sehingga persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya adalah 100 %.

### 2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan di Kota Parepare, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan/strength(S), kelemahan/weakness(W), peluang/opportunities(O) dan ancaman/Treats(T) sebagai berikut :

#### 1. Kekuatan/Strength (S)

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- c. Adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran
  - d. Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - e. Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan
  - f. Adanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor xxx Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare
  - g. Adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare
  - h. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan
  - i. Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan
  - j. Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
  - k. Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya
  - l. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui anggaran APBD, Dana Alokasi Khusus dan Dana Pajak Rokok
  - m. Terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Kelemahan/Weakness (W)
- a. Masih lemahnya pemahaman tenaga yang ada terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pembangunan kesehatan
  - b. Belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada karena masih banyak tenaga kesehatan melakukan pekerjaan dengan tugas rangkap
  - c. Belum optimalnya perkembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
  - d. Masih lemahnya kerjasama lintas sektor dan lintas program
  - e. Masih kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota
  - f. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
  - g. Belum optimalnya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
3. Peluang/Opportunities (O)
- a. Komitmen Pemerintah Kota Parepare terhadap pembangunan bidang kesehatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- b. Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus fisik dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana fisik dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Parepare
  - c. Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus non fisik dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas
  - d. Adanya anggaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi bagi setiap puskesmas di Kota Parepare untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Program Jaminan Kesehatan Nasional
  - e. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
4. Ancaman/Threats (T)
- a. Munculnya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu bersamaan terjadi peningkatan kasus penyakit tidak menular
  - b. Kota Parepare yang letaknya strategis karena merupakan jalur darat untuk ke kabupaten lain seperti Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Barru, dan memiliki pelabuhan. Letaknya yang strategis dan adanya pelabuhan tersebut membuat lalu lintas orang meningkat di Kota Parepare sehingga berpotensi masuknya penyakit-penyakit yang dapat mewabah di Kota Parepare
  - c. Masih adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat secara sosial ekonomi dan gender
  - d. Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di masyarakat
  - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan secara paripurna perilaku hidup bersih dan sehat

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah :

##### 1) Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (IMR)* Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu hamil/ibu bersalin yang meninggal pada setiap 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu adalah 301 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian adalah 7 kasus. Pada tahun 2014 tidak ada kematian ibu yang dilaporkan. Kemudian pada tahun 2015, terdapat 2 (dua) kasus kematian ibu, sehingga angka kematian ibu adalah 2015 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016, angka kematian ibu meningkat menjadi 230 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus. Kemudian pada tahun 2017, angka kematian ibu menurun, dengan jumlah kasus adalah 4 kasus, sehingga angka kematian ibu menjadi 179 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh dari target SDGs yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga kematian ibu masih menjadi masalah kesehatan.

##### 2) Demam Berdarah

Pada tahun 2013, jumlah kasus DBD sebanyak 192 kasus, sehingga Insiden Rate DBD pada tahun 2013 adalah 146,27/100.000 penduduk. Pada tahun 2014, Insiden Rate DBD menurun sangat signifikan yakni 6,78/100.000 penduduk, karena jumlah kasus DBD pada tahun tersebut hanya 9 kasus. Kemudian pada tahun 2015, jumlah kasus DBD meningkat menjadi 149 kasus, sehingga Insiden Rate DBD menjadi 108,84/100.000 penduduk. Tahun 2016, jumlah kasus DBD meningkat lagi menjadi 172 kasus, sehingga Insiden Rate DBD menjadi 124,01/100.000 penduduk. Kemudian tahun 2017, Insiden Rate DBD menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 96,14/100.000 penduduk, yang pada tahun tersebut jumlah kasus DBD sebanyak 135 kasus. Rata-rata Insiden Rate DBD dari Tahun 2013 – 2017 cukup tinggi karena melebihi indikator nasional tahun 2015 yaitu

50/100.000 penduduk sehingga Penyakit Demam Berdarah masih menjadi masalah kesehatan.

### 3) Penyakit TB

Tahun 2013, jumlah pasien TB yang sembuh adalah 12 pasien dari 23 pasien TB yang diobati sehingga angka kesembuhan adalah 52 %, kemudian pada tahun 2014, angka kesembuhan turun menjadi 24 %, yang jumlah pasien TB yang sembuh pada tahun tersebut adalah 6 pasien dari 25 pasien TB yang diobati. Pada tahun 2015 angka kesembuhan meningkat dan mampu mencapai 86 %, dengan jumlah pasien TB yang sembuh adalah 101 pasien dari 117 pasien TB yang diobati, kemudian tahun 2016, angka kesembuhan turun menjadi 84 % dengan jumlah pasien TB yang sembuh adalah 127 pasien dari 152 pasien TB yang diobati. Pada tahun 2017, jumlah pasien TB yang sembuh adalah 108 pasien dari 143 pasien TB yang diobati, sehingga angka kesembuhan kembali lagi menurun menjadi 76 %. Rata-rata angka kesembuhan penyakit TB dari tahun 2013 – 2017 adalah 64 % dan angka ini masih jauh dari angka yang harus dicapai yaitu 85 %.

Jumlah kasus penyakit TB tahun 2013 adalah 63 kasus, kemudian tahun 2014 menurun menjadi 49 kasus, lalu tahun 2015 meningkat sangat signifikan menjadi 340 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kasus penyakit TB adalah 288 kasus, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 335 kasus. Jumlah kasus penyakit TB yang cenderung meningkat dan angka kesembuhan yang masih rendah menjadikan penyakit TB masih menjadi masalah kesehatan.

### 4) Penyakit Kusta

Tahun 2013, jumlah kasus yang ditemukan adalah 352 kasus (26,82 per 10.000 penduduk), dan tahun berikutnya yakni tahun 2014 jumlah kasus yang ditemukan menurun menjadi 19 kasus (1,43 per 10.000 penduduk). Tahun 2015, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 29 kasus (2,12 per 10.000 penduduk). Tahun 2016, angka penemuan kasus kusta berhasil mencapai target dibawah 1 per 10.000 penduduk yakni 0,72 per 10.000 penduduk, yang jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 10 kasus, akan tetapi pada tahun berikutnya yakni tahun 2017, angka penemuan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,21 per 10.000 penduduk yang jumlah kasus ditemukan sebanyak 17 kasus. Rata-rata angka penemuan kasus kusta dari tahun 2013 – 2017 adalah 6,46 per 10.000 penduduk dan angka ini masih jauh dari target yakni <1 per 10.000 penduduk sehingga penyakit kusta masih menjadi masalah kesehatan

#### 4) **Kanker Payudara dan Serviks**

. Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara pada tahun 2015 sebanyak 15 orang (0,08 %) dengan tidak ada kasus IVA positif dan kasus tumor/benjolan. kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,12 % dengan jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara sebanyak 173 orang dengan 13 orang IVA positif dan 3 kasus tumor/benjolan. Pada tahun 2017, jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara meningkat menjadi 534 orang (2,64 %) dengan 59 orang IVA positif dan 35 kasus tumor/benjolan. Masih rendahnya cakupan deteksi dini kanker payudara dan serviks karena target pemerintah pusat minimal 80% perempuan usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini serta adanya peningkatan jumlah kasus IVA positif dan kasus adanya tumor/benjolan sehingga kanker payudara dan serviks masih menjadi masalah kesehatan.

#### 5) **HIV/AIDS**

Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV adalah 13 kasus, sehingga prevalensi kasus HIV pada tahun 2015 sebesar 0,099 per 1000 populasi. Pada tahun 2014, prevalensi kasus HIV sebesar 0,098 per 1000 populasi, yang jumlah kasus HIV pada tahun tersebut adalah 13 kasus. Jumlah kasus HIV pada tahun 2015 meningkat menjadi 30 kasus, sehingga prevalensi kasus HIV menjadi 0,219 per 1000 populasi. Pada tahun 2016, prevalensi kasus HIV menurun menjadi 0,05 per 1000 populasi karena jumlah kasus HIV pada tahun tersebut berjumlah 7 kasus. Dan pada tahun 2017, jumlah kasus HIV meningkat menjadi 45 kasus sehingga prevalensi kasus HIV menjadi 0,32 per 1000 populasi. Prevalensi kasus HIV di Parepare bukan tergolong rendah karena rata-rata prevalensi HIV diatas 0,05 per 1000 populasi dan jumlah kasus HIV di parepare dari tahun 2013 – 2017 meningkat secara signifikan sehingga HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan

#### 6) **Pemberian ASI Eksklusif**

Tahun 2013 jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 455 bayi dari total bayi sebanyak 1.591 bayi sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 sebesar 29 %. Tahun 2014, cakupan pemberian ASI Eksklusif mengalami peningkatan menjadi 71 %. Pada tahun 2014 jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah 654 bayi dari total bayi sebanyak 926 bayi. Kemudian pada tahun 2015, jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 2.024 bayi dari total

bayi sebanyak 2.469 bayi sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi menjadi 82 %. Pada tahun 2016, cakupan pemberian ASI Eksklusif mengalami penurunan menjadi 62 %, pada saat itu jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 1.603 bayi dari total bayi sebanyak 2.600 bayi. Kemudian pada tahun 2017, jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 785 dari total bayi sebanyak 2.738 sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 29 % di tahun 2017. Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 - 2017 masih sangat rendah dari target nasional yaitu 90 % sehingga pemberian ASI Eksklusif masih menjadi masalah kesehatan.

#### **6) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Di tahun 2013 cakupan rumah tangga yang ber PHBS mencapai 82%, dan di tahun 2014 meningkat menjadi 85 %. Pada Tahun 2015, cakupan rumah ber PHBS turun signifikan menjadi 42 %, dan kemudian kembali naik di tahun 2016 menjadi 66 %. Kenaikan ini tidak bisa menyamai angka cakupan tahun 2014. Hingga akhirnya pada tahun 2017 cakupan rumah tangga ber PHBS kembali turun menjadi 49 %. Sehingga bila ditarik data dari tahun 2013 ke tahun 2017, cakupan rumah tangga keluarga sehat menurun fluktuatif dari 82 % menjadi 49 %. Penurunan ini disebabkan karena masih banyak rumah tangga yang belum memenuhi indikator PHBS seperti bayi diberi ASI eksklusif, melakukan aktifitas fisik dan tidak merokok, rendahnya rumah tangga yang ber PHBS masih menjadi masalah kesehatan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi pembangunan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah Kota Parepare dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah: ” **TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASAR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER**”

Maksud dari Visi tersebut adalah :

#### 1. Industri Tanpa Cerobong Asap

diartikan bahwa Pemerintah Kota dengan keterbatasan sumber daya alam, bergerak cepat dengan inovasi kuat serta melibatkan semua stakeholders dalam perkuatan sektor jasa dan industri sehingga tujuan dan harapan yang ingin dicapai yaitu menghadirkan pembangunan infrastruktur di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan. Untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota industri tanpa cerobong asap, dibutuhkan kemauan kuat yang dilandasi dengan kecerdasan dan kemampuan menata kota ini yang dikenal dengan Kota B.J. Habibie menjadi kota yang punya estetika tinggi dengan mengoptimalkan ciri khas kota yang mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi pesisir, dimensi dataran rendah dan dimensi dataran tinggi. Dari kekayaan alam yang merupakan anugerah Allah SWT, maka kami mempunyai semangat kuat untuk melakukan pemetaan pembangunan di sektor industri tanpa cerobong asap meliputi : sektor pelayanan kesehatan berada pada daerah pesisir pantai dengan konsep medical tourism dan pada dimensi dataran tinggi dengan menghadirkan konsep industri proses penyelenggaraan pendidikan dengan hadirnya Institut Teknologi Habibie, sedangkan dimensi perpaduan dari tiga dimensi yang ada diharapkan menjadi industri destinasi atau kepariwisataan. Dengan harapan ini, yang tertuang dalam suatu konsep yang cukup realistis maka pada akhirnya industri tanpa cerobong asap di Kota Parepare ini adalah merupakan wujud nyata dari Teori Telapak Kaki yang menjadi motor penggerak hadirnya sumber ekonomi baru di Kota Parepare yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Hak Dasar dan Pelayanan Dasar

diartikan bahwa Pemerintah Kota telah mampu menerjemahkan dengan baik perintah konstitusi dan undang-undang kaitannya dengan era otonomi daerah yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan (pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang mana proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang mandiri dan berhasil apabila suatu daerah sudah mampu mengelola sendiri daerahnya dengan perkuatan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan

dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar. Pemerintah kota parepare telah melaksanakan dengan baik dan benar yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar seperti halnya pelayanan kesehatan secara gratis dengan mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD. A. Makkasau dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta dioptimalkan hak dasar dan pelayanan masyarakat itu dengan hadirnya Call Centre 112 diikuti dengan program Jum'at Peduli. Sedangkan di bidang Pendidikan yang juga merupakan hak dasar dan pelayanan dasar, Pemerintah kota telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah bukan hanya pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP, tapi yang tidak kalah pentingnya peningkatan mutu luaran pendidikan yang ada di Kota Parepare, salah satunya dengan menggandeng perusahaan yang mengelola pendidikan di Jepang (GAKKEN). Dengan Program GAKKEN After School yang diharapkan dapat menambah dan memperkuat pendidikan karakter yang melekat pada setiap siswa-siswi yang ada di Kota Parepare. Disamping itu, Pemerintah Kota juga sangat peduli dengan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, yaitu dengan kebijakan beasiswa S2, S3 serta demikian pula dengan fasilitas dan bantuan pembayaran uang semester 3 dan 4 bagi mahasiswa yang berasal dari Kota Parepare dan demikian pula pada akhirnya apabila mahasiswa (i) akan menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi akan diberikan bantuan biaya penyelesaian skripsi. Disamping itu, pemerintah kota tidak luput dari tanggung jawabnya untuk mewujudkan hak dasar dan pelayanan dasar masyarakat di bidang sandang, pangan dan papan. Dimana, hal ini telah diwujudkan dengan berbagai program mulai dari menggratiskan beras sejahtera demikian pula menjadikan rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni melalui Program Bedah Rumah.

### 3. Maju

diartikan bahwa Pemerintah Kota dengan dukungan dan peran serta masyarakat dalam memerankan posisi masing-masing, diharapkan mampu melahirkan sumberdaya manusia yang terbarukan serta mempunyai daya saing, sehingga produk kebijakan diharapkan bersesuaian dengan keinginan masyarakat menuju masyarakat mandiri yang diikuti pula dengan hadirnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan mandiri pula. Dengan terciptanya kondisi demikian ini, maka diharapkan terwujudnya iklim kemasyarakatan dan pemerintahan yang lebih terdepan dibandingkan dengan daerah lain, hal ini disebabkan karena adanya sinergitas antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat untuk hadirkan program- program yang pro masyarakat dengan lompatan motivasi yang kuat. Selain itu Maju mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya

kebutuhan kehidupan masyarakat Maju mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.

#### 4. Mandiri

Diartikan bahwa dengan hadirnya sinergitas antara tata kelola pemerintahan dan perkuatan sumber daya manusia terbarukan, maka diharapkan adanya kemampuan daerah dalam memerankan fungsi pelayanan menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dalam segala lini, selain itu dapat juga dikatakan, bahwa mandiri apabila mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

#### 5. Berkarakter

diartikan bahwa Pemerintah Kota mempunyai inovasi kuat untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur dan keumatan yang bersesuaian dengan karakter kearifan lokal menuju pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas yang diawali dengan pendidikan karakter yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

Dinas Kesehatan Kota Parepare sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan terutama untuk mendukung Misi I dan II dari RPJMD Pemerintah Kota Parepare periode 2018-2023 yaitu misi I adalah mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan dan Misi II adalah mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan. Dalam upaya mewujudkan Misi I dan II tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah sebagai berikut :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan.
4. Program perbaikan gizi masyarakat
5. Program pengembangan lingkungan sehat
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
8. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dan jaringannya

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

#### 1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah

#### 2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesehatan;
- b. pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara rinci keterkaitan tupoksi Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan visi, misi RPJMD Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018-2023 serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan Visi, Misi RPJMD Kota Parepare 2018 - 2023**

TUPOKSI DINAS KESEHATAN	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
<p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Kesehatan</p> <p>2. Pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kesehatan</p> <p>3. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan</p> <p>4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya</p>	<p>TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASAR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER</p>	<p>MISI II :  Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Parepare</p>	<p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare</p>	<p>Angka usia harapan hidup</p> <p>Cakupan pelayanan kefarmasian</p> <p>Cakupan sarana kesehatan yang memenuhi syarat</p> <p>Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan</p> <p>Persentase Sarana yang memenuhi syarat kesehatan</p> <p>Cakupan penggunaan obat rasional</p> <p>Rasio Dokter Per satuan penduduk</p> <p>Rasio tenaga medis per satuan penduduk</p> <p>Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</p> <p>Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat</p> <p>Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif</p> <p>Cakupan kelurahan siaga aktif</p> <p>Persentase Usulan Regulasi kesehatan yang diterbitkan</p> <p>Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat</p> <p>Persentase balita gizi buruk</p> <p>Prevalensi balita gizi kurang</p> <p>Cakupan pemberian ASI Eksklusif</p> <p>Cakupan penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan</p> <p>Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</p> <p>Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum</p> <p>Cakupan tenaga gizi terlatih</p> <p>Cakupan TTU memenuhi syarat</p> <p>Cakupan TPM Memenuhi syarat</p> <p>Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat</p> <p>Cakupan Pos UKK aktif</p> <p>Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga</p>

TUPOKSI DINAS KESEHATAN	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
					<p>Cakupan pasar sehat</p> <p>Cakupan kelurahan UCI</p> <p>Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak</p> <p>Non polio AFP rate per100.000 penduduk</p> <p>Cakupan balita pneumonia yang ditangani</p> <p>Tingkat prevalensiTuberkolosis</p> <p>Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA</p> <p>Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan</p> <p>Tingkat kematian karena tuberkolosis</p> <p>Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS</p> <p>Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS</p> <p>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</p> <p>Penderita diare yang ditangani</p> <p>Angka kejadian malaria</p> <p>Tingkat kematian akibat malaria</p> <p>proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida</p> <p>Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat</p> <p>Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi</p> <p>Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS</p> <p>Penggunaan kondom pada perilaku seks berisiko tinggi</p> <p>Cakupan pelayanan penderita hipertensi</p> <p>Cakupan pelayanan penderitaDM</p> <p>Cakupan pelayanan penderitaGangguan Kejiwaan</p> <p>Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt;24jam</p> <p>Cakupan penanganan penyakit Rabies dan zoonosis lainnya</p> <p>Cakupan penanganan penyakit kusta</p> <p>Cakupan penanganan penyakit kanker</p> <p>Cakupan perokok usia produktif</p>

TUPOKSI DINAS KESEHATAN	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
					<p>Cakupan posbindu aktif  Cakupan pelayanan kesehatan indera  Cakupan penanganan penyakit typhoid</p> <p>Rasio posyandu per satuan balita  Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk  Cakupan puskesmas  Cakupan puskesmas pembantu  Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk</p> <p>Cakupan Pemeriksaan K1-K4 ibu hamil  Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri  Angka kematian bayi (AKI) per 1000 kelahiran hidup  Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup  Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani  Angka kelangsungan hidup bayi  Cakupan kunjungan bayi  Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup  Cakupan pelayanan anak balita  Angka kematian ibu (AKI)  Cakupan pelayanan nifas  cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan  Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan  Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>Cakupan pelayanan kesehatan lansia</p> <p>Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe  Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</p>

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program**  
**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi dan Program KDH dan Wa KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi :</b> <b>Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan</b>			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masih belum tertibnya administrasi umum dan keuangan	Masih rendahnya kompetensi pegawai dalam bidang akuntansi	Jumlah pegawai administasi umum dan keuangan yang memadai
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Tersedianya tatalaksana penanggulangan penyakit
	Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi	Rendahnya penemuan dini kasus	Pelaksanaan surveilans epidemiologi
		Kurangnya pemahaman terhadap kesehatan ibu dan anak	Adanya kelas ibu hamil dan balita
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Belum terdistribusinya tenaga SDM kesehatan berdasarkan beban kerja	Belum ada regulasi yang mengatur tentang mutasi dan rotasi berdasarkan beban kerja	Jumlah tenaga SDM yang memadai

Misi dan Program KDH dan Wa KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PHBS	PHBS belum menjadi gaya hidup	PHBS sudah menjadi program nasional

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

#### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 mengacu pada Visi, Misi dan Nawa Cita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Agenda ke 5 dari Nawa Cita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ke 5 tersebut maka disusunlah Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja dan Program Indonesia Sejahtera.

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu :

- a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak
- b. Meningkatnya pengendalian penyakit
- c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan
- d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan
- e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
- f. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama yaitu :

#### a. Penerapan Paradigma Sehat

Dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat

#### b. Penguatan Pelayanan Kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan

#### c. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Strategi yang dilakukan adalah perluasan sasaran dan manfaat(benefit), serta kendali mutu dan biaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Tujuan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2015-2019 yaitu

a. Meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Indikator yang akan dicapai adalah :

- 1) Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010) menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012)
- 2) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
- 3) Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%
- 4) Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif
- 5) Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial dibidang kesehatan.

Ukuran yang akan dicapai adalah :

- 1) Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dari 37% menjadi 10%
- 2) Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya pengendalian penyakit

- c. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- e. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- f. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga
- g. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
- h. Meningkatnya integritas perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi
- i. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- j. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
- k. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
- l. Meningkatnya system informasi kesehatan integrasi

Dengan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare 2018-2023 telah selaras dan sejalan, dimana tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta strategi pembangunan kesehatan mempunyai relevansi sesuai yang diharapkan. Namun pencapaian sasaran renstra Kementerian Kesehatan RI terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kota Parepare masih belum optimal.

## 2. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada Visi, Misi Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah :

**“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”**

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembang sejumlah Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment* [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kota Parepare telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011 – 2031. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, dan dikategorikan sebagai Kota Sedang. Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33 km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Parepare apabila ditinjau dari aspek topografi terdiri dari daerah datar sampai

bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80 persen luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25 – 500 meter di atas permukaan laut, dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96 persen) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56 persen), kehutanan (43,04 persen) dan daerah pemukiman (1,57 persen), serta sebagian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04 persen) dengan fungsi permukiman (2,80 persen), pertanian (9,40 persen), dan perikanan (0,24 persen).

Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >500 meter di atas permukaan laut. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Soreang, berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa morfologi Kota Parepare terbagi atas morfologi rendah dan tinggi (perbukitan/pegunungan). Geologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu (1) dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai KarajaE, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meter di atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih utara selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50 sampai 250 meter di atas muka laut di sekitar Bacukiki dan Lapadde.

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi Kepala daerah, Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Kesehatan. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kota Parepare adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terutama calon ibu dan keluarga terkait hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari dalam mempersiapkan kelahiran.
- Masih kurangnya jumlah posyandu
- Kurangnya SDM/Kader untuk melakukan pelacakan, penderita melakukan pemeriksaan/pengobatan diluar dr Faskes yang menggunakan program DOTS.
- Masih tingginya Komplikasi penyakit TB dengan penyakit lain seperti DM, HIV.
- Masih tingginya Gizi Buruk.
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan minum obat penderita (perlu peran aktif dari keluarga/PMO).

- Rendahnya Mobilisasi ibu hamil, terkadang ibu hamil menjalani persalinan diluar kota atau ibu hamil yang berdomisili diluar kota melakukan persalinan di Kota Parepare.
- Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk membawa balitanya ke Posyandu setelah selesai periode imunisasi dasar lengkap.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Parepare**

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
			DINAS KESEHATAN				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi serta administrasi umum dan keuangan	100%	100%	100%
Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Cakupan TTU dan TPM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renstra dan Renja	2 dok	2 dok	2 dok
Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Persentase Balita Gizi Buruk	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular	Persentase Balita Gizi Kurang	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
	Meningkatnya system kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen monev program. Kegiatan dan sub kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok
				Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	1 dok	1 dok	1 dok

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai dengan standar	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN	424 orang	424 orang	424 orang
	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Rumah Sakit/Klinik/ dan Fasyankes lainnya yang diawasi		Jumlah ASN yang diberi insentif COVID-19	20 Orang	20 Orang	20 Orang
				Jumlah ASN yang diberi insentif Kegiatan Vaksin	87 orang	87 orang	87 orang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	73 Dok	73 Dok	73 Dok
	meningkatkan sistem informasi yang berintegrasi	Persentase penggunaan sistem informasi berbasis IT	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	1 dok
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran/ bulanan/Triwulanan	14 dok	14 dok	14 dok
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%
	meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di puskesmas sesuai dengan standar	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dihasilkan		1 Dok	1 dok
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 kali	12 kali
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat	6 orang	6 orang	6 orang
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Jumlah sarana kesehatan, penghasil dan distribusi produk makanan yang diperiksa dan dibina	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	10 orang	10 orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	1 paket	1 paket	1 paket

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1 paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan posyandu yang dibina	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah exemplar	132 ex	132 ex	132 ex
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan material	1 paket	1 paket	1 paket
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pembelian paket makanan	1 paket	1 paket	1 paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	20 laporan	20 laporan	20 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis
			jumlah pengadaan peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terbayarnya jasa penunjang	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1200 surat	1200 surat
					Terlaksananya jasa pengantar surat	12 bulan	12 bulan
					Terlaksananya surat elektronik	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tepat waktu tagihan listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja			
					2021	2022	2023	
					Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Jumlah Tenaga Honorer Dinkes yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan	87 orang	87 orang	
					Jumlah jasa tenaga cleaning service yang dibayarkan	4 orang	4 orang	
					terbayarnya jasa supir	1 orang	1 orang	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajak tahunannya	2 unit	2 unit	2 unit	
				jumlah pejabat yang mendapatkan BBM Operasional	29 orang	29 orang	29 orang	
				Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa service	2 unit	2 unit	2 unit	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya perizinan kendaraan operasional /lapangan	17 stnk	17 stnk	17 stnk	
				Jumlah kendaan operasional/lapangan yang mendapatkan jasa service	17 unit	17 unit	17 unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasnya pemeliharaan gedung kantor	150 m2	150 m2	150 m2	
				Jumlah luasnya pemeliharaan rumah jabatan	120 m2	120 m2	120 m2	
				Jumlah pembayaran PBB	1 kali	1 kali	1 kali	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100%	100%	100%
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3%	3%	3%
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02
				Rasio posyandu per satuan balita	8,92	8,93	9,06
				Cakupan pembantu puskesmas	95,45%	95,45%	100%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan puskesmas	200%	200%	200%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1 paket	1 paket

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90%	95%	100%
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 paket	1 paket	1 paket
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang alkalnya dikalibrasi	8 pkm	8 pkm	8 pkm
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93%	94%	95%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2 kasus	2 kasus	2 kasus
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%	88%	90%
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%	98%	99%
				Cakupan pelayanan nifas	92%	94%	95%
				Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	97%	98%	99%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			
				Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			
				Total Fertility Rate (TFR).			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH	4 /1000 KH	2 /1000 KH
				Angka kelangsungan hidup bayi	994	996	998
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH	8 /1000 KH	4 /1000 KH
				Cakupan kunjungan bayi	92%	94%	95%
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	82%	84%	85%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4/1000 KH	2/1000 KH	2/1000 KH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	70%	75%	80%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Prevalensi tekanan darah tinggi.	16%	15%	10%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80%	80%	80%
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	234/100.000	232/100.000	230/100.000
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6/100.000	5/100.000	5/100.000
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	80%	80%	80%
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%	95%	95%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,05	<0,05	<0,05
				pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	80%	85%	90%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	80%	80%	90%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase Sasaran yang di Vaksin Covid-19	50%	60%	70%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	16%	16%	16%
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	24%	24%	24%
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	24%	24%	24%
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	<5	<5	<5
				Prevalensi anemia pada ibu hamil.	20%	15%	10%
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	65%	70%	75%
				Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80%	85%	90%
				Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	24%	24%	24%
				Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum			
				Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	85%	85%	85%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	40%	50%	60%
				Cakupan Pos UKK aktif	60%	80%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan TTU memenuhi syarat	87%	90%	95%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan TPM Memenuhi syarat	87%	90%	95%
				Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	89%	90%	95%
				Cakupan kelurahan ber- STBM	41%	55%	68%
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan	4 media	4 media	4 media
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	50%	60%	70%
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	210 KK	210 KK	210 KK
				Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 CJH	120 CJH	120 CJH
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100	100	100
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100000	1/100000	1/100000
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100
				Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%
				Angka kejadian Malaria	23	20	20
				Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
				Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	100	100
				Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	20%	15%	10%
				Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	20%	15%	10%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	4 pasien	3 pasien	3 pasien
				Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0%	0%	0%
				Proporsi kematian akibat keracunan.	0%	0%	0%
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	95%	95%
				Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	800/1000 pddk	900/1000 pddk	950/1000 pddk
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	100%	100%
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0%	0%	0%
				Cakupan Penanganan Pasien Akibat NAPZA	100%	100%	100%
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen COVID-19 yang diambil dan dikirim untuk pemeriksaan hasil laboratorium	3.574	3.574	3.574

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan kota sehat yang dicapai	7	8	8
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2000 kunjungan
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	14 keg	14 keg	14 keg
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian (Instalasi Farmasi Kesehatan)	10 sarpras	10 sarpras	10 sarpras
				Persentase Penanganan Kasus	100%	100%	100%
				Persentase Sampel pemeriksaan yang diperiksa/ditangani oleh labkesda	100%	100%	100%
				Persentase kasus yang ditangani Ambulance laut	100%	100%	100%
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang diakreditasi	80%	90%	100%
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	20%	20%	20%
				Terakreditasinya Labkesda	100%	100%	100%
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Kasus yang ditangani akibat kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	8 pkm	8 pkm	8 pkm
				Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW	152 RW	152 RW
				Jumlah Dokumen Profil Promkes yang dibuat	1 dok	1 dok	1 dok
				Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dibuat	1 dok	1 dok	1 dok
				Jumlah Dokumen Hasil Opname Sarpras	1 dok	1 dok	1 dok
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Aplikasi Database Kunjungan Pasien dan Rekam Medik di Puskesmas		12 operator	12 operator
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		1 paket	1 paket
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasyankes lainnya	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	terlaksananya PME Labkesda	2 siklus		
				Puskesmas yang mengupdate sarprasnya melalui aplikasi ASPAK	8 pkm		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas yang melaksanakan PIS PK	8 pkm		
				terlaksananya BLUD Puskesmas	8 pkm		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	50/100.000	50/100.000	50/100.000
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/100.000	98/100.000	98/100.000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Non ASN yang diberi insentif COVID-19 dan Kegiatan vaksin	50 org	50 org	50 org
				Tersedianya Data Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar	1 dok	1 dok	1 dok
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	60 orang	60 orang
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	60 orang	60 orang
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan kefarmasian	98,50%	99%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	100%	100%	100%
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 sarana	50 sarana	50 sarana
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya data SIPNAP	1 dok	1 dok	1 dok
				Tersedianya data perizinan	1 dok	1 dok	1 dok
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	15 PKRT	15 PKRT
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	15 PKRT	15 PKRT
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	35 P-IRT	40 P-IRT
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	35 P-IRT	40 P-IRT
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	4 KEC	4 KEC

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindaklanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	4 KEC	4 KEC
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Sampel yang diperiksa	15 sampel	20 sampel	25 sampel
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan /Penyedia/Penghasil/Distributor Produk Makanan dan Minuman	24 sarana	24 sarana	24 sarana
				Jumlah Sampel yang diperiksa	15 sampel	20 sampel	25 sampel
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindaklanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Tersedianya data pengawasan perizinan P-IRT	1 dok	1 dok	1 dok
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	40%	50%	60%
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Rumah yang ber PHBS/Keluarga sehat	60%	70%	70%
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah yang ber PHBS/Keluarga sehat	60%	70%	70%
				Cakupan Kelurahan siaga aktif	95%	95%	100%
				Promosi kawasan tanpa rokok	60%	70%	70%
				persentase kader yang diberi insentif	100%	100%	100%
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan posyandu yang dibina	70%	75%	80%



TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2019 - 2020

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA		
							2019	2020	
							TARGET	TARGET	
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Persentase Penderita Gizi Buruk / Gizi Kurang	1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
			1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
			1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	100%	100%	100%	
			1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	
			1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan kefarmasian	97,11%	97,50%	98,00%	
					Cakupan sarana kesehatan yang memenuhi syarat	73%	75%	78%	
					Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	73%	75%	78%	
				Angka Usia Harapan Hidup		Persentase Sarana yang memenuhi syarat kesehatan	85%	86%	88%
						Cakupan penggunaan obat rasional	70%	75%	75%
					Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan BMHP	2 paket	2 paket	2 paket

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Pelayanan Instalasi Farmasi (IFK)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian	8 sarana	8 sarana	9 sarana
				Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana IFK	4 sarpras	4 sarpras	1 sarpras
				Pelaksanaan Stock Opname Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang didata dan diperiksa	30 SARANA	30 SARANA	30 SARANA
				Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alkes yang dikalibrasi	2 PAKET	2 PAKET	1 PAKET
				Pengelolaan Pelayanan SDK	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan rekomendasi ijin kesehatan	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	50 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
				Pembinaan dan Pengawasan Pangan, Bahan makanan Berbahaya dan IRTP	Jumlah PIRT yang mendapatkan pembinaan	30 PIRT	30 PIRT	35 PIRT
				Pembinaan dan Pengawasan sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT	Jumlah sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 SARANA	50 SARANA	55 SARANA
				Pengembangan Penggunaan Obat Rasional	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi terkait penggunaan obat rasional	50 ORANG	50 ORANG	100 ORG
				Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Jumlah fasyankes yang mengembangkan pelayanan obat tradisional dan komplementer	3 SARANA	3 SARANA	3 SARANA
			1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Dokter Per satuan penduduk	1:978	1:970	1:950
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:135	1:135	1:125
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95%	95%	95%
					Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	60%	60%	65%
					Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif	0%	50%	55%
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0%	75%	80%
					Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0%	60%	65%
					Cakupan Kesehatan Haji	85%	85%	88%
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cempae	Jumlah Kunjungan Pasien	5100 Kunjungan	5100 Kunjungan	5300 kunjungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lakessi	Jumlah Kunjungan Pasien	8000 kunjungan	8000 kunjungan	8200 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lapadde	Jumlah Kunjungan Pasien	4750 kunjungan	4750 kunjungan	4950 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	5600 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lompoe	Jumlah Kunjungan Pasien	4300 kunjungan	4300 kunjungan	4500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lumpue	Jumlah Kunjungan Pasien	6400 kunjungan	6400 kunjungan	6600 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Kusta Lauleng	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	31000 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	31000 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Type D Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	5600 kunjungan
				Penyelenggaraan Layanan Call Centre 112	Jumlah kasus yang ditangani Call Centre 112	16.745 kasus	16.745 kasus	16.945 kasus
				Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan daerah	Jumlah Sampel yang diperiksa	250 sampel	250 sampel	300 sampel
				Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase ibu hamil yang ditangani yang tidak memiliki pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%
				Penyediaan BOK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Kegiatan UKM yang terlaksana	12 lap	12 lap	13 lap
				Penyediaan BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	12 keg	12 keg	13 keg
				Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan lokmin bulanan dan linsek yang terlaksana di puskesmas	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat tepat waktu	6 pkm	6 pkm	6 pkm
				Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang akreditasi/reakreditasi	0	6 pkm	6 pkm
				Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	Jumlah Labkesda yang terakreditasi	0	1	0
				Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase pasien yang ditanggung pembiayaannya dan ditangani di faskes	100%		100%
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) BPJS	Jumlah puskesmas yang bermitra dengan BPJS	6 pkm	6 pkm	6 pkm
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN)	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan dalam setahun	4 kali	4 kali	4 kali
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Cempae	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lumpue	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lompoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lapadde	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lakessi	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lemoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah tatanan yg dicapai	6 Tatanan	6 Tatanan	7 Tatanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Penyelenggaraan SP2TP	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	6 Fasyankes	6 Fasyankes	7 Fasyankes
				Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	Jumlah SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut	12 SD	12 SD	24 SD
				Peningkatan Kesehatan Olahraga, P3K dan BSB	Jumlah pendampingan tim medis pada kegiatan	30	30	35
				Pemantauan Wilayah Setempat	Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW	152 RW	152 RW
				Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	120 KK	120 KK	140 KK
				Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	130 orang	130 orang	130 orang
			1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif	70%	71,42%	91%
					Persentase Usulan Regulasi kesehatan yang diterbitkan	0	25%	25%
					Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	0	25%	30%
				Pengembangan operasional poskeskel	Jumlah poskeskel aktif	11 Poskeskel	11 Poskeskel	11 Poskeskel
				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan	4 media	4 media	4 media
				Penguatan bidang kesehatan melalui regulasi	Jumlah regulasi bidang kesehatan yang diterbitkan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
				Pembinaan Saka Bhakti Husada	jumlah siswa yang dibina melalui Saka Bhakti Husada	30 orang	30 orang	35 orang
				Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah Kader posyandu yang mendapatkan insentif kader	709 orang	709 orang	762 orang
				Pembinaan Kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan	6 Kelompok	6 Kelompok	11 Kelompok
				Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang mendapatkan pembinaan	147 SD	147 SD	147 SD
			1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,036652	0,024435	0,024435
					Prevalensi balita gizi kurang	3,69	3,67	3,05
					Cakupan pemberian ASI Eksklusif	52%	55%	60%
					Cakupan penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan	0%	50%	60%
					Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0%	70%	75%
					Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum	0,00%	0,02%	0,02%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan tenaga gizi terlatih	12 orang	12 orang	10 orang
			20.xx	Pelaksanaan ASI Eksklusif	Jumlah Ibu melahirkan yang melakukan IMD	1.382	1.382	1.658
			20.xx	Penanganan Kasus Gizi Kurang	Persentase penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan sesuai standar	100%	100%	100%
			20.xx	Pembinaan kelompok rawan gizi	Jumlah kelompok rawan gizi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan gizi	0	22 kelompok	44 kelompok
			20.xx	Pelaksanaan Surveilans Gizi	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan survey Konsumsi	220 RT	220 RT	308 RT
			1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan TTU memenuhi syarat	82%	82%	85%
					Cakupan TPM Memenuhi syarat	75%	80%	85%
					Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	85%	85%	87%
					Cakupan Pos UKK aktif	20%	20%	40%
					Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	0	20%	30%
					Cakupan pasar sehat	0	16%	33%
					Cakupan kelurahan ber- STBM	0	13,50%	27%
				Pembinaan dan Pengawasan TTU	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan		90 TTU	100 TTU
				Pembinaan dan Pengawasan TPM	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan		55 TPM	60 TPM
				Pembinaan dan Pengawasan Sarana Sir bersih dan Air minum	Jumlah sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan		110 Sarana	110 Sarana
				Pelaksanaan STBM	Jumlah kelurahan yang menjalankan pilar STBM		3 Kelurahan	6 Kelurahan
				Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Formal dan Informal	Jumlah pos UKK yang aktif melakukan pembinaan dan pemeriksaan pekerja		6 Pos UKK	7 Pos UKK
				Pelaksanaan dan Pengembangan Kesehatan Olahraga	Jumlah institusi yang melaksanakan kesehatan olahraga		8 instansi	8 instansi
				Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pasar yang dibina dan memenuhi syarat kesehatan		1 pasar	2 pasar
			1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kelurahan UCI	100%	100%	100%
					Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	115%	116%	117%
					Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100.000	1/100.000	1/100.000
					Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,10%	0,15%	0,20%
					Tingkat prevalensi Tuberkolosis	240/100.000	238/100.000	236/100.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	65%	70%	80%
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%
					Tingkat kematian karena tuberkolosis	8/100.000	7/100.000	6/100.000
					Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	65%	70%	80%
					Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80%	85%	90%
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%
					Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%
					Angka kejadian malaria	24	24	26
					Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
					proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0
					Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0
					Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	<0,05	<0,05	<0,05
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	85%	90%	92%
					Penggunaan kondom pada perilaku seks beresiko tinggi	60%	70%	70%
					Cakupan pelayanan penderita hipertensi	65%	70%	75%
					Cakupan pelayanan penderita DM	98%	100%	100%
					Cakupan pelayanan penderita Gangguan Kejiwaan	100%	100%	100%
					Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	100%	100%	100%
					Cakupan penanganan penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan penanganan penyakit kusta	RFT 100%	RFT 100%	RFT 100%
					Cakupan penanganan penyakit kanker	1%	20%	20%
					Cakupan perokok usia produktif	5,40%	10%	10%
					Cakupan posbindu aktif	100%	100%	100%
					Cakupan pelayanan kesehatan indera	100%	100%	100%
					Cakupan penanganan penyakit typoid	100%	100%	100%
			22.08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap		2699 bayi	2726 bayi
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio	Jumlah kasus ASF yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia	Jumlah kasus penderita pneumonia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	207	250	275
			22.18	Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru	Jumlah penderita TB yang ditemukan dan mendapatkan perawatan	354	370	400
					Jumlah kasus TB yang terdata dalam program DOTS			
			22.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD	Jumlah fogging fokus yang dilaksanakan	38 fokus	150 fokus	175 fokus
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	Jumlah penderita diare yang mendapatkan pengobatan	4185	4600	5000
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria yang mendapatkan pengobatan	24	25	30
			22.16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	22780	23048	24120
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	Jumlah penderita IMS yang mendapatkan pengobatan	32	30	28
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi	Jumlah penduduk yang mendapatkan deteksi dini hipertensi	13212	13512	13812
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Meliitus	Jumlah penduduk yang mendapatkan screening DM	6818	7499	8250
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kejiwaan dan Napza	Jumlah kunjungan gangguan penyakit kejiwaan	418	418	300

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelacakan dan supervisi KLB	2	2	2
				Pengembangan Surveilans Masyarakat Terpadu	Jumlah RT/RW yang melaksanakan program SMART	75	75	80
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	Jumlah kelompok peduli rabies yang dibentuk	0,00	1,00	4,00
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kusta	Jumlah pasien kusta yang mendapatkan perawatan	13 orang	12 orang	10 orang
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kanker	Jumlah penduduk yang mendapatkan deteksi dini penyakit kanker	284	350	400
				Penatalaksanaan upaya berhenti merokok	Jumlah penduduk yang mendapatkan konseling upaya berhenti merokok	15622,00	17250,00	18975,00
				Pelayanan Pandu PTM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan screening PTM	8185,00	9000,00	9900,00
				Pencegahan dan Penanganan Gangguan Indera	Jumlah penduduk yg mendapatkan deteksi dini gangguan indera	0	800	900
				Pencegahan dan pengendalian penyakit typhoid	Jumlah pasien typhoid yang mendapatkan pelayanan	1382	1520	1670
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis	Jumlah Penduduk yang mendapatkan deteksi dini hepatitis	2675	2675	2700
			1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio posyandu per satuan balita	8,81	8,90	8,91
					Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05
					Cakupan puskesmas	1,5	1,75	1,75
					Cakupan puskesmas pembantu	95,45	95,45	95,45
					Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02
				Pembangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang dibangun	0	3	2
				Rehabilitasi Bangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang direhabilitasi	0	28	28
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana posyandu		28 kit	28 kit
				Pembangunan Puskesmas Baru	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 unit	0	0

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Rehabilitasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi	6	7	7
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0	7 paket	7 paket
				Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskemas Pembantu yang dibangun	0	0	0
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	0	4 unit	4 unit
				Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	0	4 paket	4 paket
			1.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pemeriksaan K1-K4 ibu hamil	100/90	100%/90%	100%/92%
					Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	70%	80%	80%
					Angka kematian bayi (AKI) per 1000 kelahiran hidup	10 /1000 KH	9/1000KH	8/1000KH
					Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	8 /1000 KH	8/1000KH	6/1000KH
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	82%
					Angka kelangsungan hidup bayi	990	991	992
					Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	92%
					Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	8/1000 KH	6/1000 KH
					Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%	92%
					Angka kematian ibu (AKI)	3 kasus	3 kasus	2 kasus
					Cakupan pelayanan nifas	85%	90%	92%
					cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%	85%	86%
					Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60%	60%	
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%	96%
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	90%	92%
					Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	96%	97%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250	250	300
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2737 orang	2737 orang	2737 orang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				
			1.02.01.X.X.	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	23%	23%	30%
				Penatalaksanaan kesehatan lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	560	560 orang	560 orang
				Pemberdayaan kelompok Lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan	56	56 kelompok	56 kelompok
				Peningkatan status gizi lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan gizi	56	56 kelompok	56 kelompok
			1.02.01.X.X.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe			80%
					Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	3,69	3,67	3,05
				Peningkatan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7958 orang	7958 orang	8356 orang
				Pemantauan pertumbuhan Balita	Jumlah Balita ditimbang yang naik berat badannya	7366 orang	7366 orang	8053 orang
				Peningkatan status gizi balita	Jumlah anak stunting usia 6-24 bulan yang mendapatkan MPASI (PMT Lokal)	35%	35 anak	49 anak
			1.02.01.X.X.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata jaringannya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	2 unit	2 unit	
				Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Pengadaan alkes	2 paket	2 paket	2 paket
				Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah Pegadaan mebeleur	2 paket	2 paket	2 paket
				Pengadaan Sarana dan Prasarana RS yang dibangun	Pengadaan sarana dan prasarana RS yang dibangun	2 paket	2 paket	2 paket

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (Strength / kekuatan, weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, threat / tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023:



**VISI : TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASAR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER**

**MISI II : Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, terutama bayi, anak, ibu hamil, sekelompok masyarakat resiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut.	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pengendalian faktor risiko lingkungan	Peningkatan sosialisasi hidup sehat.
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat		Mewujudkan kondisi kesehatan lingkungan pemukiman penduduk yang lebih baik agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan

Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau			
	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Peningkatan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Menjamin ketersediaan obat dan makanan yang memenuhi standar Kesehatan	Peningkatan jumlah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin Peningkatan sistem pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar bebas dimasyarakat
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Meningkatkan sistem surveilans	Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah yang melibatkan masyarakat
	Meningkatnya system kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB		
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular		
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standar	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta distribusi tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Melakukan analisis jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas (sesuai permenkes nomor 43 tahun 2019) dan diajukan ke Pemerintah Kota untuk ditindaklanjuti.
	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai dengan standar	Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Kesehatan	Peningkatan kebutuhan infrastruktur kesehatan
	Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Manata sistem manajemen dan informasi kesehatan	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018-2023 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
			DINAS KESEHATAN		120.991.631.423	143.407.439.454	150.012.449.922	414.411.520.799							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi serta administrasi umum dan keuangan	100%	35.161.908.151	36.932.003.559	38.778.603.736	110.872.515.446						
Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	100%	55.996.500	58.796.325	61.736.141	176.528.966	Dinas Kesehatan					
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Cakupan TTU dan TPM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renstra dan Renja	2 dok	19.999.700	20.999.685	22.049.669	63.049.054						
Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Persentase Balita Gizi Buruk	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 dok	5.999.200	6.299.160	6.614.118	18.912.478						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 dok	5.999.200	6.299.160	6.614.118	18.912.478						
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular	Persentase Balita Gizi Kurang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD	1 dok	5.999.200	6.299.160	6.614.118	18.912.478						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 dok	5.999.200	6.299.160	6.614.118	18.912.478						
	Meningkatnya system kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen monev program. Kegiatan dan sub kegiatan	1 dok	12.000.000	12.600.000	13.230.000	37.830.000						
				Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	1 dok										
	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai dengan standar	ketersediaan sarana dan prasarana layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	33.381.068.760	35.050.122.198	36.802.628.308	105.233.819.266						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN	424 orang	33.320.469.560	34.986.493.038	36.735.817.690	105.042.780.288						
	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Rumah Sakit/Klinik/ dan Fasyankes lainnya yang diawasi		Jumlah ASN yang diberi insentif COVID-19	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20 Orang						
				Jumlah ASN yang diberi insentif Kegiatan Vaksin	87 orang		87 orang	87 orang	87 orang						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	73 Dok	42.600.000	44.730.000	46.966.500	134.296.500						
	meningkatkan sistem informasi yang berintegrasi	Persentase penggunaan sistem informasi berbasis IT	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	5.999.800	6.299.790	6.614.780	18.914.370						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	5.999.800	6.299.790	6.614.780	18.914.370						
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran/ bulanan/Triwulanan	14 dok	5.999.600	6.299.580	6.614.559	18.913.739						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	50.000.000	64.500.000	67.725.000	182.225.000						
	meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di puskesmas sesuai dengan standar	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dihasilkan			6.000.000	6.300.000	12.300.000						
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			12 kali	6.000.000	12 kali	6.300.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat	6 orang	30.000.000	6 orang	31.500.000	6 orang	33.075.000	18 orang	94.575.000			
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Jumlah sarana kesehatan, penghasil dan distribusi produk makanan yang diperiksa dan dibina	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	20.000.000	10 orang	21.000.000	10 orang	22.050.000	10 orang	63.050.000			
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%	203.632.745	100%	213.814.382	100%	224.505.101	100%	641.952.229			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	1 paket	9.976.625	1 paket	10.475.456	1 paket	10.999.229	3 paket	31.451.310			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	8.993.400	1 paket	9.443.070	1 paket	9.915.224	3 paket	28.351.694			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	23.999.800	1 paket	25.199.790	1 paket	26.459.780	3 paket	75.659.370			
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan posyandu yang dibina	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exemplar	132 ex	24.800.000	132 ex	26.040.000	132 ex	27.342.000	132 ex	78.182.000			
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan material	1 paket	30.998.520	1 paket	32.548.446	1 paket	34.175.868	3 paket	97.722.834			
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pembelian paket makanan	1 paket	5.000.000	1 paket	5.250.000	1 paket	5.512.500	3 paket	15.762.500			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	20 laporan	99.864.400	20 laporan	104.857.620	20 laporan	110.100.501	60 laporan	314.822.521			
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis peralatan yang diadakan</b>	5 jenis	42.757.000	5 jenis	44.894.850	5 jenis	47.139.593	5 jenis	134.791.443			
			Jumlah pengadaan peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	5 jenis	42.757.000	5 jenis	44.894.850	5 jenis	47.139.593	5 jenis	134.791.443			
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terbayarnya jasa penunjang</b>	100%	1.097.613.146	100%	1.152.493.803	100%	1.210.118.493	100%	3.460.225.443			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	24.999.950		26.249.948		27.562.445		78.812.342			
					Terlaksananya jasa pengantar surat					12 bulan		12 bulan			
					Terlaksananya surat elektronik					12 bulan		12 bulan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tepat waktu tagihan listrik, air dan telepon	160.999.196		169.049.156		177.501.614		507.549.965			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	911.614.000		957.194.700		1.005.054.435		2.873.863.135			
					Jumlah Tenaga Honorer Dinkes yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan					87 orang		87 orang			
					Jumlah jasa tenaga cleaning service yang dibayarkan					4 orang		4 orang			
					terbayarnya jasa supir					1 orang		1 orang			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	330.840.000	100%	347.382.000	100%	364.751.100	100%	1.042.973.100		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajak tahunannya	2 unit	145.400.000		152.670.000		160.303.500	458.373.500			
					Jumlah pejabat yang mendapatkan BBM Operasional	29 orang				29 orang		29 orang			
					Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa service	2 unit				2 unit		2 unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya perizinan kendaraan operasional /lapangan	17 stnk	95.000.000		99.750.000		104.737.500	299.487.500			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
				Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang mendapatkan jasa service	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	5 jenis	14.940.000	5 jenis	15.687.000	5 jenis	16.471.350	5 jenis	47.098.350		
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasnya pemeliharaan gedung kantor	150 m2	75.500.000	150 m2	79.275.000	150 m2	83.238.750	150 m2	238.013.750		
				Jumlah luasnya pemeliharaan rumah jabatan	120 m2		120 m2		120 m2		120 m2			
				Jumlah pembayaran PBB	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	82.961.900.347	100%	102.966.116.085	100%	107.549.060.385	100%	293.477.076.818		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100%	20.481.983.717	100%	26.621.082.903	100%	27.952.137.048	100%	75.055.203.668		
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,05	100.000.000	0,05	105.000.000	0,05	110.250.000	0,05	315.250.000		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3%		3%		3%	0	3%	0		
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02		0,02	500.000.000	0,02	525.000.000	0,02	1.025.000.000		
				Rasio posyandu per satuan balita	8,92		8,93		9,06	0	9,06	0		
				Cakupan pembantu puskesmas	95,45%		95,45%		100%	0	100%	0		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan puskesmas	200%		200%	4.615.000.000	200%	4.845.750.000	200%	9.460.750.000		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	212.545.000	1 paket	223.172.250	1 paket	234.330.863	3 paket	670.048.113		
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	98.902.000	1 paket	103.847.100	1 paket	109.039.455	3 paket	311.788.555		
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	2.233.924.453	1 paket	2.345.620.676	1 paket	2.462.901.709	3 paket	7.042.446.838		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	13.951.414.774	1 paket	14.648.985.513	1 paket	15.381.434.788	3 paket	43.981.835.075		
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1.574.992.910	1 paket	1.653.742.556	1 paket	1.736.429.683	3 paket	4.965.165.149		
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90%		95%		100%		100%			
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 paket	2.211.804.580	1 paket	2.322.394.809	1 paket	2.438.514.549	3 paket	6.972.713.938		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang alkesnya dikalibrasi	8 pkm	98.400.000	8 pkm	103.320.000	8 pkm	108.486.000	8 pkm	310.206.000		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	62.336.217.830	100%	75.390.033.182	100%	78.594.173.337	100%	216.320.424.350		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	44.999.550	100%	47.249.528	100%	49.612.004		52.092.604	Dinas Kesehatan	
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93%		94%		95%		95%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	472.800.000	100%	496.440.000	100%			969.240.000		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2 kasus		2 kasus		2 kasus	0	2 kasus			
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%		88%		90%	0	90%			
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%		98%		99%	0	99%			
				Cakupan pelayanan nifas	92%		94%		95%					
				Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	97%		98%		99%		99%			
				Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.										
				Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).								0		
				Total Fertility Rate (TFR).								0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	14.999.650	100%	15.749.633	100%			30.749.283		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH		4 /1000 KH		2 /1000 KH	0	2 /1000 KH			
				Angka kelangsungan hidup bayi	994		996		998	0	998			
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH		8 /1000 KH		4 /1000 KH		2 /1000 KH			
				Cakupan kunjungan bayi	92%		94%		95%		95%			
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	82%		84%		85%		85%	0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	24.999.900	100%	26.249.895	100%			51.249.795		
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4/1000 KH		2/1000 KH		2/1000 KH		2/1000 KH			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	14.999.750	100%	15.749.738	100%	16.537.224		47.286.712		
				Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	70%		75%		80%					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	30.000.000	100%	31.500.000		61.500.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	14.988.250	100%	15.737.663	100%	16.524.546		47.250.458		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	50.000.000	100%	52.500.000		102.500.000		
				Prevalensi tekanan darah tinggi.	16%		15%		10%		10%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	14.999.600	100%	15.749.580	100%	16.537.059		47.286.239		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	50.000.000	100%	52.500.000		102.500.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	300.000.000	100%	315.000.000		615.000.000		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80%		80%		80%	0	80%	0		
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	234/100.000		232/100.000		230/100.000	0	230/100.000	0		
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6/100.000		5/100.000		5/100.000	0	5/100.000	0		
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	80%		80%		80%	0	80%	0		
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%		95%		95%	0	95%	0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	85.000.000	100%	89.250.000		174.250.000		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05			
				pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	80%		85%		90%		90%	0		
				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	80%	70.000.000	80%	70.000.000	90%	73.500.000	90%	213.500.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase Sasaran yang di Vaksin Covid-19	50%	855.500.000	60%	898.275.000	70%	943.188.750		2.696.963.750		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	84.700.050	100	700.000.000	100	735.000.000	100	1.519.700.050		
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	16%		16%		16%	0	16%	0		
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	24%		24%		24%	0	24%	0		
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	24%		24%		24%	0	24%	0		
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	<5		<5		<5	0		0		
				Prevalensi anemia pada ibu hamil.	20%		15%		10%	0	10%	0		
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	65%		70%		75%	0	75%	0		
				Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80%		85%		90%		90%	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
				Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	24%		24%		24%	0	24%	0		
				Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum								0		
				Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	85%		85%		85%		85%	0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	40%	50.565.450	50%	53.093.723	60%	55.748.409		159.407.581		
				Cakupan Pos UKK aktif	60%		80%		100%			0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan TTU memenuhi syarat	87%	111.108.050	90%	300.000.000	95%	315.000.000		726.108.050		
				Cakupan TPM Memenuhi syarat	87%		90%		95%			0		
				Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	89%		90%		95%			0		
				Cakupan kelurahan ber- STBM	41%		55%		68%			0		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan	4 media	122.547.400	4 media	128.674.770	4 media	135.108.509		386.330.679		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	50%	30.000.000	60%	31.500.000	70%	33.075.000	80%	94.575.000		
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	210 KK	124.997.000	210 KK	131.246.850	210 KK	137.809.193		394.053.043		
				Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 CJH		120 CJH		120 CJH					
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	100	994.791.410	100	1.044.530.981	100	1.096.757.530	100%	3.136.079.920		
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100000		1/100000		1/100000	0	1/100000	0		
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100		100		100	0	100	0		
				Penderita diare yang ditangani	100%		100%		100%	0	100%	0		
				Angka kejadian Malaria	23		20		20	0	20	0		
				Tingkat kematian akibat malaria	0		0		0	0	0	0		
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0		0		0		0	0		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100		100		100	0	100	0		
				Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100		100		100	0		0		
				Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	20%		15%		10%	0	10%	0		
				Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	20%		15%		10%	0	10%	0		
				Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	4 pasien		3 pasien		3 pasien	0	3 pasien	0		
				Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0%		0%		0%		0%	0		
				Proporsi kematian akibat keracunan.	0%		0%		0%		0%	0		
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100		100		100			0		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	1.525.000.000		
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	24.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	31.500.000.000	100%	85.500.000.000		
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.	95%	2.000.000.000	95%	2.000.000.000	95%	2.100.000.000		6.100.000.000		
				Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	800/1000 pddk		900/1000 pddk		950/1000 pddk		950/1000 pddk	0		
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	13.928.000.000	100%	14.000.000.000	100%	14.700.000.000	100%	42.628.000.000		
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0%	9.999.600	0%	70.000.000	0%	73.500.000	0%	153.499.600		
				Cakupan Penanganan Pasien Akibat NAPZA	100%	-	100%		100%		100%	0		
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen COVID-19 yang diambil dan dikirim untuk pemeliksaan hasil laboratorium	3.574	49.780.000	3.574	200.000.000	3.574	210.000.000	10.722	459.780.000		
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan kota sehat yang dicapai	7	185.000.000	8	350.000.000	8	367.500.000	8	902.500.000		
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan	2000 kunjungan	8.999.998.561	2000 kunjungan	9.449.998.489	2000 kunjungan	9.922.498.414	6000 kunjungan	28.372.495.464		
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%		100%		100%		100%			
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	14 keg	4.769.228.705	14 keg	7.890.441.791	14 keg	8.284.963.881	14 keg	20.944.634.377		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian (Instalasi Farmasi Kesehatan)	10 sarpras	2.594.614.804	10 sarpras	2.724.345.544	10 sarpras	2.860.562.821	10 sarpras	8.179.523.170		
				Persentase Penanganan Kasus	100%		100%		100%		100%			
				Persentase Sampel pemeriksaan yang diperiksa/ditangani oleh labkesda	100%		100%		100%		100%			
				Persentase kasus yang ditangani Ambulance laut	100%		100%		100%		100%			
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang diakreditasi	80%	702.604.600	90%	1.500.000.000	100%	1.575.000.000	100%	3.777.604.600		
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	20%	1.500.000.000	20%	2.000.000.000	20%	2.100.000.000	20%	5.600.000.000		
				Terakritisasinya Labkesda	100%		100%		100%		100%			
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Kasus yang ditangani akibat kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	100%		100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	102.500.000		
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	49.995.500	100%	150.000.000	100%	157.500.000		357.495.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	24.996.050	100%	430.000.000	100%	451.500.000	100%	906.496.050		
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	8 pkm	24.996.050	8 pkm	155.000.000	8 pkm	162.750.000	8 pkm	342.746.050		
				Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW		152 RW		152 RW		152 RW			
				Jumlah Dokumen Profil Promkes yang dibuat	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
				Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dibuat	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
				Jumlah Dokumen Hasil Opname Sarpras	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Aplikasi Database Kunjungan Pasien dan Rekam Medik di Puskesmas			12 operator	75.000.000	12 operator	78.750.000	12 operator	153.750.000		
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			1 paket	200.000.000	1 paket	210.000.000	1 paket	410.000.000		
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	118.702.750	100%	525.000.000	100%	551.250.000	100%	1.194.952.750		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasyankes lainnya	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	14.994.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	55.994.000		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	terlaksananya PME Labkesda	2 siklus	103.708.750		505.000.000		530.250.000		1.138.958.750		
				Puskesmas yang mengupdate sarprasnya melalui aplikasi ASPAK	8 pkm									
				Puskesmas yang melaksanakan PIS PK	8 pkm									
				terlaksananya BLUD Puskesmas	8 pkm									
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	50/100.000	1.276.034.800	50/100.000	1.339.836.540	50/100.000	1.406.828.367		4.022.699.707	Dinas Kesehatan	
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/100.000		98/100.000		98/100.000		98/100.000	0		
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	24.999.800	50 org	26.249.790	70 org	27.562.280	160 org	78.811.870		
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	24.999.800	50 org	26.249.790	70 org	27.562.280	160 org	78.811.870		
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	1.054.999.400	50 org	1.107.749.370	70 org	1.163.136.839	160 org	3.325.885.609		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Non ASN yang diberi insentif COVID-19 dan Kegiatan vaksin	50 org	1.025.000.000	50 org	1.076.250.000	50 org	1.130.062.500	50 org	3.231.312.500		
				Tersedianya Data Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.							0			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	29.999.400	50 org	31.499.370	70 org	33.074.339	160 org	94.573.109		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	196.035.600	60 orang	205.837.380	60 orang	216.129.249	60 orang	618.002.229		
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	196.035.600	60 orang	205.837.380	60 orang	216.129.249	60 orang	618.002.229		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan kefarmasian	98,50%	192.466.200	99%	245.353.070	100%	257.620.724	100%	695.439.994	Dinas Kesehatan	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	100%	20.448.600	100%	41.471.030	100%	43.544.582	100%	105.464.212		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 sarana		50 sarana	20.000.000	50 sarana	21.000.000	50 sarana	41.000.000		
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya data SIPNAP	1 dok	20.448.600	1 dok	21.471.030	1 dok	22.544.582	1 dok	64.464.212		
				Tersedianya data perizinan	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	10.000.000	15 PKRT	10.500.000	15 PKRT	11.025.000	15 PKRT	31.525.000		
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	10.000.000	15 PKRT	10.500.000	15 PKRT	11.025.000	15 PKRT	31.525.000		
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	97.744.800	35 P-IRT	102.632.040	40 P-IRT	107.763.642	40	308.140.482		
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	97.744.800	35 P-IRT	102.632.040	40 P-IRT	107.763.642	40	308.140.482		
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	15.000.000	4 KEC	15.750.000	4 KEC	16.537.500	4 KEC	47.287.500		
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindakan lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	15.000.000	4 KEC	15.750.000	4 KEC	16.537.500	4 KEC	47.287.500		
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Sampel yang diperiksa	15 sampel	49.272.800	20 sampel	75.000.000	25 sampel	78.750.000	25 sampel	203.022.800		
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan /Penyedia/Penghasil/Distributor Produk Makanan dan Minuman	24 sarana	49.272.800	24 sarana	60.000.000	24 sarana	63.000.000	24 sarana	172.272.800		



TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 - 2020

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Persentase Penderita Gizi Buruk / Gizi Kurang	1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	1.810.296.000	100%	1.811.581.285	Dinas Kesehatan	
			1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	355.000.000	100%	373.700.799	Dinas Kesehatan	
			1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	100%	100%	10.000.000	100%	10.526.783	Dinas Kesehatan	
			1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	40.000.000	100%	40.458.648	Dinas Kesehatan	
			1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan kefarmasian	97,11%	97,50%	3.040.573.000	98,00%	3.079.688.184	Dinas Kesehatan	
				Cakupan sarana kesehatan yang memenuhi syarat	73%	75%		78%				
				Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	73%	75%		78%				
				Persentase Sarana yang memenuhi syarat kesehatan	85%	86%		88%				
				Cakupan penggunaan obat rasional	70%	75%		75%				
				Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan		Jumlah pengadaan obat dan BMHP	2 paket	2 paket	2.900.000.000	2 paket	6.500.000.000	
				Pelayanan Instalasi Farmasi (IFK)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian	8 sarana	8 sarana	30.000.000	9 sarana	25.000.000		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana IFK	4 sarpras	4 sarpras	108.150.000	1 sarpras	400.000.000		
				Pelaksanaan Stock Opname Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang didata dan diperiksa	30 SARANA	30 SARANA	25.000.000	30 SARANA	25.000.000		
				Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alkes yang dikalibrasi	2 PAKET	2 PAKET	25.000.000	1 PAKET	50.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan SDK	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan rekomendasi ijin kesehatan	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	15.000.000	50 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	25.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Pangan, Bahan makanan Berbahaya dan IRTP	Jumlah PIRT yang mendapatkan pembinaan	30 PIRT	30 PIRT	15.000.000	35 PIRT	25.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT	Jumlah sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 SARANA	50 SARANA	22.500.000	55 SARANA	25.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
				Pengembangan Penggunaan Obat Rasional	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi terkait penggunaan obat rasional	50 ORANG	50 ORANG	22.500.000	100 ORG	25.000.000		
				Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Jumlah fasyankes yang mengembangkan pelayanan obat tradisional dan komplementer	3 SARANA	3 SARANA	22.500.000	3 SARANA	25.000.000		
			1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Dokter Per satuan penduduk	1:978	1:970	37.264.095.933	1:950	37.439.346.560	Dinas Kesehatan	
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:135	1:135		1:125			
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan	95%	95%		95%			
					Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	60%	60%		65%			
					Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif	0%	50%		55%			
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0%	75%		80%			
					Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0%	60%		65%			
					Cakupan Kesehatan Haji	85%	85%		88%			
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cempae	Jumlah Kunjungan Pasien	5100 Kunjungan	5100 Kunjungan	50.000.000	5300 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lakessi	Jumlah Kunjungan Pasien	8000 kunjungan	8000 kunjungan	50.000.000	8200 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lapadde	Jumlah Kunjungan Pasien	4750 kunjungan	4750 kunjungan	50.000.000	4950 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	50.000.000	5600 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lompoe	Jumlah Kunjungan Pasien	4300 kunjungan	4300 kunjungan	50.000.000	4500 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lumpue	Jumlah Kunjungan Pasien	6400 kunjungan	6400 kunjungan	50.000.000	6600 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan	50.000.000	2500 kunjungan	55.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Kusta Lauleng	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	200.000.000	31000 kunjungan	225.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	200.000.000	31000 kunjungan	225.000.000		
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan		2500 kunjungan			
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Type D Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	20.000.000.000	5600 kunjungan	30.000.000.000		
				Penyelenggaraan Layanan Call Centre 112	Jumlah kasus yang ditangani Call Centre 112	16.745 kasus	16.745 kasus	2.225.000.000	16.945 kasus	2.630.000.000		
				Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan daerah	Jumlah Sampel yang diperiksa	250 sampel	250 sampel	25.000.000	300 sampel	30.000.000		
				Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase ibu hamil yang ditangani yang tidak memiliki pembiayaan kesehatan	100%	100%	486.000.000	100%	500.000.000		
				Penyediaan BOK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Kegiatan UKM yang terlaksana	12 lap	12 lap	574.000.000	13 lap	600.000.000		
				Penyediaan BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	12 keg	12 keg	3.131.000.000	13 keg	3.500.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
							PERENCANAAN	2019		2020			
								TARGET	Rp.	TARGET			Rp.
				Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan lokmin bulanan dan linsek yang terlaksana di puskesmas	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	250.000.000	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	250.000.000			
				Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat tepat waktu	6 pkm	6 pkm	100.000.000	6 pkm	100.000.000			
				Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang akreditasi/reakreditasi	0	6 pkm	942.950.000	6 pkm	1.000.000.000			
				Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	Jumlah Labkesda yang terakreditasi	0	1	300.000.000	0	300.000.000			
				Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase pasien yang ditanggung pembiayaannya dan ditangani di faskes	100%		17.940.000.000	100%	18.216.000.000			
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) BPJS	Jumlah puskesmas yang bermitra dengan BPJS	6 pkm	6 pkm	10.229.000.000	6 pkm	10.229.000.000			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN)	Jumlah pertemuan money yang dilaksanakan dalam setahun	4 kali	4 kali	15.000.000	4 kali	20.000.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Cempae	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	37.000.000	1 paket	37.000.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lumpue	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	170.650.000	1 paket	170.650.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lompoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	63.800.000	1 paket	63.800.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	23.000.000	1 paket	23.000.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lapadde	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	69.100.000	1 paket	69.100.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lakessi	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	81.196.000	1 paket	81.196.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lemoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	-	1 paket	50.000.000			
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	-	1 paket	50.000.000			
				Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah tatanan yg dicapai	6 Tatanan	6 Tatanan	400.000.000	7 Tatanan	200.000.000			
				Penyelenggaraan SP2TP	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	6 Fasyankes	6 Fasyankes	20.000.000	7 Fasyankes	22.500.000			
				Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	Jumlah SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut	12 SD	12 SD	25.000.000	24 SD	50.000.000			
				Peningkatan Kesehatan Olahraga, P3K dan BSB	Jumlah pendampingan tim medis pada kegiatan	30	30	60.000.000	35	65.000.000			
				Pemantauan Wilayah Setempat	Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW	152 RW	190.000.000	152 RW	200.000.000			
				Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	120 KK	120 KK	25.000.000	140 KK	27.500.000			
				Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	130 orang	130 orang	85.000.000	130 orang	87.500.000			
			1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif	70%	71,42%	920.000.000	91%	929.945.059	Dinas Kesehatan		
					Persentase Usulan Regulasi kesehatan yang diterbitkan	0	25%		25%				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
					Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	0	25%		30%			
				Pengembangan operasional poskeskel	Jumlah poskeskel aktif	11 Poskeskel	11 Poskeskel	150.000.000	11 Poskeskel	150.000.000		
				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat	Jumlah media penyebaran informasi kesehatan	4 media	4 media	55.000.000	4 media	55.000.000		
				Penguatan bidang kesehatan melalui regulasi	Jumlah regulasi bidang kesehatan yang diterbitkan	1 Regulasi	1 Regulasi	150.000.000	1 Regulasi	150.000.000		
				Pembinaan Saka Bhakti Husada	jumlah siswa yang dibina melalui Saka Bhakti Husada	30 orang	30 orang	30.000.000	35 orang	30.000.000		
				Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah Kader posyandu yang mendapatkan insentif kader	709 orang	709 orang	1.276.200.000	762 orang	1.371.600.000		
				Pembinaan Kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan	6 Kelompok	6 Kelompok	30.000.000	11 Kelompok	30.000.000		
				Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang mendapatkan pembinaan	147 SD	147 SD	30.000.000	147 SD	30.000.000		
			1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,036652	0,024435	222.473.000	0,024435	229.466.962	Dinas Kesehatan	
					Prevalensi balita gizi kurang	3,69	3,67		3,05			
					Cakupan pemberian ASI Eksklusif	52%	55%		60%		Dinas Kesehatan	
					Cakupan penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan	0%	50%		60%			
					Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0%	70%		75%			
					Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum	0,00%	0,02%		0,02%			
					Cakupan tenaga gizi terlatih	12 orang	12 orang		10 orang			
			20.xx	Pelaksanaan ASI Eksklusif	Jumlah Ibu melahirkan yang melakukan IMD	1.382	1.382	25.000.000	1.658	100.000.000		
			20.xx	Penanganan Kasus Gizi Kurang	Persentase penderita gizi kurang yang medapatkan Perawatan sesuai standar	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
			20.xx	Pembinaan kelompok rawan gizi	Jumlah kelompok rawan gizi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan gizi	0	22 kelompok	100.000.000	44 kelompok	100.000.000		
			20.xx	Pelaksanaan Surveilans Gizi	Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan survey Konsumsi	220 RT	220 RT	150.000.000	308 RT	150.000.000		
			1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan TTU memenuhi syarat	82%	82%	40.000.000	85%	42.107.132	Dinas Kesehatan	
					Cakupan TPM Memenuhi syarat	75%	80%		85%			
					Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	85%	85%		87%			
					Cakupan Pos UKK aktif	20%	20%		40%			
					Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	0	20%		30%			
					Cakupan pasar sehat	0	16%		33%			
					Cakupan kelurahan ber- STBM	0	13,50%		27%			
				Pembinaan dan Pengawasan TTU	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	90 TTU		30.000.000	100 TTU	30.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan TPM	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	55 TPM		30.000.000	60 TPM	30.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Sarana Sir Bersih dan Air minum	Jumlah sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan	110 Sarana		30.000.000	110 Sarana	30.000.000		
				Pelaksanaan STBM	Jumlah kelurahan yang menjalankan pilar STBM	3 Kelurahan		30.000.000	6 Kelurahan	30.000.000		
				Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Formal dan Informal	Jumlah pos UKK yang aktif melakukan pembinaan dan pemeriksaan pekerja	6 Pos UKK		30.000.000	7 Pos UKK	30.000.000		
				Pelaksanaan dan Pengembangan Kesehatan Olahraga	Jumlah institusi yang melaksanakan kesehatan olahraga	8 instansi		30.000.000	8 instansi	30.000.000		
				Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pasar yang dibina dan memenuhi syarat kesehatan	1 pasar		30.000.000	2 pasar	30.000.000		
			1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kelurahan UCI	100%	100%	747.533.000	100%	754.825.535		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
					Persentase anak usia 1 tahun yg dimunisasi campak	115%	116%		117%			
					Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100.000	1/100.000		1/100.000			
					Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,10%	0,15%		0,20%			
					Tingkat prevalensi Tuberkolosis	240/100.000	238/100.000		236/100.000			
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	65%	70%		80%			
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan	100%	100%		100%			
					Tingkat kematian karena tuberkolosis	8/100.000	7/100.000		6/100.000			
					Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	65%	70%		80%			
					Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80%	85%		90%			
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%			
					Penderita diare yang ditangani	100%	100%		100%			
					Angka kejadian malaria	24	24		26			
					Tingkat kematian akibat malaria	0	0		0			
					proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0		0			
					Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0		0			
					Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	<0,05	<0,05		<0,05			
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	85%	90%		92%			
					Penggunaan kondom pada perilaku seks beresiko tinggi	60%	70%		70%			
					Cakupan pelayanan penderita hipertensi	65%	70%		75%			
					Cakupan pelayanan penderita DM	98%	100%		100%			
					Cakupan pelayanan penderita Gangguan Kejiwaan	100%	100%		100%			
					Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	100%	100%		100%			
					Cakupan penanganan penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	100%	100%		100%			
					Cakupan penanganan penyakit kusta	RFT 100%	RFT 100%		RFT 100%			
					Cakupan penanganan penyakit kanker	1%	20%		20%			
					Cakupan perokok usia produktif	5,40%	10%		10%			
					Cakupan posbindu aktif	100%	100%		100%			
					Cakupan pelayanan kesehatan indera	100%	100%		100%			
					Cakupan penanganan penyakit typhoid	100%	100%		100%			
			22.08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap		2699 bayi	50.000.000	2726 bayi	50.000.000		
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio	Jumlah kasus ASF yang mendapatkan penanganan	100%	100%	30.000.000	100%	32.500.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia	Jumlah kasus penderita pneumonia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	207	250	30000000	275	32500000		
			22.18	Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru	Jumlah penderita TB yang ditemukan dan mendapatkan perawatan	354	370	200000000	400	200000000		
					Jumlah kasus TB yang terdata dalam program DOTS							
			22.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD	Jumlah fogging fokus yang dilaksanakan	38 fokus	150 fokus	150.000.000	175 fokus	155.000.000		
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	Jumlah penderita diare yang mendapatkan pengobatan	4185	4600	30.000.000	5000	32.500.000		
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria yang mendapatkan pengobatan	24	25	30.000.000	30	32.500.000		
			22.16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	22780	23048	100.000.000	24120	100.000.000		
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	Jumlah penderita IMS yang mendapatkan pengobatan	32	30	30.000.000	28	32.500.000		
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi	Jumlah penduduk yang mendapatkan deteksi dini hipertensi	13212	13512	50.000.000	13812	52.500.000		
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Meliitus	Jumlah penduduk yang mendapatkan screening DM	6818	7499	50.000.000	8250	52.500.000		
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kejiwaan dan Napza	Jumlah kunjungan gangguan penyakit kejiwaan	418	418	150.000.000	300	155.000.000		
				Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelacakan dan supervisi KLB	2	2	30.000.000	2	32.500.000		
				Pengembangan Surveilans Masyarakat Terpadu	Jumlah RT/RW yang melaksanakan program SMART	75	75	30.000.000	80	32.500.000		
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	Jumlah kelompok peduli rabies yang dibentuk	0,00	1,00	75.000.000	4,00	77.500.000		
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kusta	Jumlah pasien kusta yang mendapatkan perawatan	13 orang	12 orang	30000000	10 orang	32500000		
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kanker	Jumlah penduduk yang mendapat deteksi dini penyakit kanker	284	350	50000000	400	52500000		
				Penatalaksanaan upaya berhenti merokok	Jumlah penduduk yang mendapatkan konseling upaya berhenti merokok	15622,00	17250,00	50000000	18975,00	52500000		
				Pelayanan Pandu PTM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan screening PTM	8185,00	9000,00	50000000	9900,00	52500000,00		
				Pencegahan dan Penanganan Gangguan Indera	Jumlah penduduk yg mendapatkan deteksi dini gangguan indera	0	800	30.000.000	900	32.500.000		
				Pencegahan dan pengendalian penyakit tyloid	Jumlah pasien tyloid yang mendapatkan pelayanan	1382	1520	30.000.000	1670	32.500.000		
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis	Jumlah Penduduk yang mendapatkan deteksi dini hepatitis	2675	2675	30.000.000	2700	32.500.000		
			1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio posyandu per satuan balita	8,81	8,90	27.090.617.000	8,91	27.173.719.278	Dinas Kesehatan	
					Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,05	0,05		0,05			
					Cakupan puskesmas	1,5	1,75		1,75			
					Cakupan puskesmas pembantu	95,45	95,45		95,45			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
					Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02		0,02			
				Pembangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang dibangun	0	3		2			
				Rehabilitasi Bangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang direhabilitasi	0	28		28			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana posyandu		28 kit		28 kit			
				Pembangunan Puskesmas Baru	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 unit	0		0			
				Rehabilitasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi	6	7		7			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0	7 paket		7 paket			
				Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun	0	0		0			
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	0	4 unit		4 unit			
				Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	0	4 paket		4 paket			
			1.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pemeriksaan K1-K4 ibu hamil	100/90	100%/90%	90.000.000	100%/92%	90.579.064	Dinas Kesehatan	
					Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	70%	80%		80%			
					Angka kematian bayi (AKI) per 1000 kelahiran hidup	10 /1000 KH	9/1000KH		8/1000KH			
					Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	8 /1000 KH	8/1000KH		6/1000KH			
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%		82%			
					Angka kelangsungan hidup bayi	990	991		992			
					Cakupan kunjungan bayi	90%	90%		92%			
					Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	8/1000 KH		6/1000 KH			
					Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%		92%			
					Angka kematian ibu (AKI)	3 kasus	3 kasus		2 kasus			
					Cakupan pelayanan nifas	85%	90%		92%			
					cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%	85%		86%			
					Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60%	60%	70%	75%			
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%		96%			
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	90%		92%			
					Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	96%		97%			
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250	250	25.000.000	300	75.000.000		
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2737 orang	2737 orang	25.000.000	2737 orang	100.000.000		
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia								
			1.02.01.X.X.	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	23%	23%		30%	120.772.085		
				Penatalaksanaan kesehatan lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	560	560 orang	25.000.000	560 orang	27.500.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2019		2020			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
				Pemberdayaan kelompok Lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan	56	56 kelompok	25.000.000	56 kelompok	50.000.000		
				Peningkatan status gizi lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan gizi	56	56 kelompok	30.000.000	56 kelompok	35.000.000		
			1.02.01.X.X.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe				80%	211.351.149	Dinas Kesehatan	
					Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	3,69	3,67		3,05			
				Peningkatan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7958 orang	7958 orang	100.000.000	8356 orang	50.000.000		
				Pemantauan pertumbuhan Balita	Jumlah Balita ditimbang yang naik berat badannya	7366 orang	7366 orang	25.000.000	8053 orang	100.000.000		
				Peningkatan status gizi balita	Jumlah anak stunting usia 6-24 bulan yang mendapatkan MPASI (PMT Lokal)	35%	35 anak	35.000.000	49 anak	45.000.000		
			1.02.01.X.X.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata jaringannya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	2 unit	2 unit	45.000.000.000		60.000.000.000		
				Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Pengadaan alkes	2 paket	2 paket		2 paket			
				Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah Pegadaan mebeleur	2 paket	2 paket		2 paket			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana RS yang dibangun	Pengadaan sarana dan prasarana RS yang dibangun	2 paket	2 paket		2 paket			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam 5 tahun mendatang (2018-2023) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN REVISI RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
			DINAS KESEHATAN				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi serta administrasi umum dan keuangan	100%	100%	100%
Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Cakupan TTU dan TPM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renstra dan Renja	2 dok	2 dok	2 dok
Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Persentase Balita Gizi Buruk	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular	Persentase Balita Gizi Kurang	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
	Meningkatnya system kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen monev program. Kegiatan dan sub kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok
				Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	1 dok	1 dok	1 dok

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai dengan standar	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN	424 orang	424 orang	424 orang
	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Rumah Sakit/Klinik/ dan Fasyankes lainnya yang diawasi		Jumlah ASN yang diberi insentif COVID-19	20 Orang	20 Orang	20 Orang
				Jumlah ASN yang diberi insentif Kegiatan Vaksin	87 orang	87 orang	87 orang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	73 Dok	73 Dok	73 Dok
	meningkatkan sistem informasi yang berintegrasi	Persentase penggunaan sistem informasi berbasis IT	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	1 dok	1 dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	1 dok
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran/ bulanan/Triwulanan	14 dok	14 dok	14 dok
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%
	meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di puskesmas sesuai dengan standar	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dihasilkan		1 Dok	1 dok
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 kali	12 kali
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat	6 orang	6 orang	6 orang
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Jumlah sarana kesehatan, penghasil dan distribusi produk makanan yang diperiksa dan dibina	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	10 orang	10 orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	1 paket	1 paket	1 paket

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1 paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan posyandu yang dibina	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah exemplar	132 ex	132 ex	132 ex
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan material	1 paket	1 paket	1 paket
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pembelian paket makanan	1 paket	1 paket	1 paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	20 laporan	20 laporan	20 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis
			jumlah pengadaan peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terbayarnya jasa penunjang	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1200 surat	1200 surat
					Terlaksananya jasa pengantar surat	12 bulan	12 bulan
					Terlaksananya surat elektronik	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tepat waktu tagihan listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja			
					2021	2022	2023	
					Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Jumlah Tenaga Honorer Dinkes yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan	87 orang	87 orang	87 orang
					Jumlah jasa tenaga cleaning service yang dibayarkan	4 orang	4 orang	4 orang
					terbayarnya jasa supir	1 orang	1 orang	1 orang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajak tahunannya	2 unit	2 unit	2 unit	
				jumlah pejabat yang mendapatkan BBM Operasional	29 orang	29 orang	29 orang	
				Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa service	2 unit	2 unit	2 unit	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya perizinan kendaraan operasional /lapangan	17 stnk	17 stnk	17 stnk	
				Jumlah kendaan operasional/lapangan yang mendapatkan jasa service	17 unit	17 unit	17 unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasnya pemeliharaan gedung kantor	150 m2	150 m2	150 m2	
				Jumlah luasnya pemeliharaan rumah jabatan	120 m2	120 m2	120 m2	
				Jumlah pembayaran PBB	1 kali	1 kali	1 kali	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100%	100%	100%
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3%	3%	3%
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02
				Rasio posyandu per satuan balita	8,92	8,93	9,06
				Cakupan pembantu puskesmas	95,45%	95,45%	100%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan puskesmas	200%	200%	200%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1 paket	1 paket

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90%	95%	100%
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 paket	1 paket	1 paket
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang alkalnya dikalibrasi	8 pkm	8 pkm	8 pkm
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93%	94%	95%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2 kasus	2 kasus	2 kasus
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87%	88%	90%
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%	98%	99%
				Cakupan pelayanan nifas	92%	94%	95%
				Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	97%	98%	99%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			
				Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			
				Total Fertility Rate (TFR).			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH	4 /1000 KH	2 /1000 KH
				Angka kelangsungan hidup bayi	994	996	998
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6 /1000 KH	8 /1000 KH	4 /1000 KH
				Cakupan kunjungan bayi	92%	94%	95%
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	82%	84%	85%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4/1000 KH	2/1000 KH	2/1000 KH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	70%	75%	80%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Prevalensi tekanan darah tinggi.	16%	15%	10%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80%	80%	80%
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	234/100.000	232/100.000	230/100.000
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6/100.000	5/100.000	5/100.000
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	80%	80%	80%
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%	95%	95%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,05	<0,05	<0,05
				pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	80%	85%	90%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	80%	80%	90%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase Sasaran yang di Vaksin Covid-19	50%	60%	70%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	16%	16%	16%
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	24%	24%	24%
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	24%	24%	24%
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	<5	<5	<5
				Prevalensi anemia pada ibu hamil.	20%	15%	10%
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	65%	70%	75%
				Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80%	85%	90%
				Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	24%	24%	24%
				Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum			
				Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	85%	85%	85%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	40%	50%	60%
				Cakupan Pos UKK aktif	60%	80%	100%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan TTU memenuhi syarat	87%	90%	95%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan TPM Memenuhi syarat	87%	90%	95%
				Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	89%	90%	95%
				Cakupan kelurahan ber- STBM	41%	55%	68%
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan	4 media	4 media	4 media
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	50%	60%	70%
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	210 KK	210 KK	210 KK
				Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 CJH	120 CJH	120 CJH
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100	100	100
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100000	1/100000	1/100000
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100
				Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%
				Angka kejadian Malaria	23	20	20
				Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
				Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	100	100
				Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	20%	15%	10%
				Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	20%	15%	10%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	4 pasien	3 pasien	3 pasien
				Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0%	0%	0%
				Proporsi kematian akibat keracunan.	0%	0%	0%
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	95%	95%
				Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	800/1000 pddk	900/1000 pddk	950/1000 pddk
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	100%	100%
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0%	0%	0%
				Cakupan Penanganan Pasien Akibat NAPZA	100%	100%	100%
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen COVID-19 yang diambil dan dikirim untuk pemeriksaan hasil laboratorium	3.574	3.574	3.574

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan kota sehat yang dicapai	7	8	8
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2000 kunjungan
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	14 keg	14 keg	14 keg
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian (Instalasi Farmasi Kesehatan)	10 sarpras	10 sarpras	10 sarpras
				Persentase Penanganan Kasus	100%	100%	100%
				Persentase Sampel pemeriksaan yang diperiksa/ditangani oleh labkesda	100%	100%	100%
				Persentase kasus yang ditangani Ambulance laut	100%	100%	100%
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang diakreditasi	80%	90%	100%
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	20%	20%	20%
				Terakreditasinya Labkesda	100%	100%	100%
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Kasus yang ditangani akibat kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	8 pkm	8 pkm	8 pkm
				Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW	152 RW	152 RW
				Jumlah Dokumen Profil Promkes yang dibuat	1 dok	1 dok	1 dok
				Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dibuat	1 dok	1 dok	1 dok
				Jumlah Dokumen Hasil Opname Sarpras	1 dok	1 dok	1 dok
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Aplikasi Database Kunjungan Pasien dan Rekam Medik di Puskesmas		12 operator	12 operator
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		1 paket	1 paket
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasyankes lainnya	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	terlaksananya PME Labkesda	2 siklus		
				Puskesmas yang mengupdate sarprasnya melalui aplikasi ASPAK	8 pkm		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas yang melaksanakan PIS PK	8 pkm		
				terlaksananya BLUD Puskesmas	8 pkm		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	50/100.000	50/100.000	50/100.000
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/100.000	98/100.000	98/100.000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Non ASN yang diberi insentif COVID-19 dan Kegiatan vaksin	50 org	50 org	50 org
				Tersedianya Data Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar	1 dok	1 dok	1 dok
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	40 org	50 org	70 org
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	60 orang	60 orang
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus Singkat	30 orang	60 orang	60 orang
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan kefarmasian	98,50%	99%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	100%	100%	100%
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 sarana	50 sarana	50 sarana
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya data SIPNAP	1 dok	1 dok	1 dok
				Tersedianya data perizinan	1 dok	1 dok	1 dok
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	15 PKRT	15 PKRT
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	15 PKRT	15 PKRT	15 PKRT
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	35 P-IRT	40 P-IRT
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapatkan pembinaan	30 P-IRT	35 P-IRT	40 P-IRT
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	4 KEC	4 KEC

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindaklanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kecamatan yang makanan Jajanan dan Sentra Makanan dalam wilayah kecamatan tersebut telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta memperoleh Stiker pembinaan	4 KEC	4 KEC	4 KEC
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Sampel yang diperiksa	15 sampel	20 sampel	25 sampel
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan /Penyedia/Penghasil/Distributor Produk Makanan dan Minuman	24 sarana	24 sarana	24 sarana
				Jumlah Sampel yang diperiksa	15 sampel	20 sampel	25 sampel
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindaklanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Tersedianya data pengawasan perizinan P-IRT	1 dok	1 dok	1 dok
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	40%	50%	60%
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Rumah yang ber PHBS/Keluarga sehat	60%	70%	70%
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah yang ber PHBS/Keluarga sehat	60%	70%	70%
				Cakupan Kelurahan siaga aktif	95%	95%	100%
				Promosi kawasan tanpa rokok	60%	70%	70%
				persentase kader yang diberi insentif	100%	100%	100%
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan posyandu yang dibina	70%	75%	80%



**INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN REVISI RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2019 - 2020**

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA		
							2019	2020	
							TARGET	TARGET	
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Parepare	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare	Persentase Penderita Gizi Buruk / Gizi Kurang	1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
			1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
			1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	100%	100%	100%	
			1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	
			1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan kefarmasian	97,11%	97,50%	98,00%	
					Cakupan sarana kesehatan yang memenuhi syarat	73%	75%	78%	
					Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	73%	75%	78%	
				Angka Usia Harapan Hidup		Persentase Sarana yang memenuhi syarat kesehatan	85%	86%	88%
						Cakupan penggunaan obat rasional	70%	75%	75%
						Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan BMHP	2 paket	2 paket

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Pelayanan Instalasi Farmasi (IFK)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kefarmasian	8 sarana	8 sarana	9 sarana
				Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana IFK	4 sarpras	4 sarpras	1 sarpras
				Pelaksanaan Stock Opname Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang didata dan diperiksa	30 SARANA	30 SARANA	30 SARANA
				Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alkes yang dikalibrasi	2 PAKET	2 PAKET	1 PAKET
				Pengelolaan Pelayanan SDK	Jumlah sarana yang mendapatkan pembinaan dan rekomendasi ijin kesehatan	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	40 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN	50 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
				Pembinaan dan Pengawasan Pangan, Bahan makanan Berbahaya dan IRTP	Jumlah PIRT yang mendapatkan pembinaan	30 PIRT	30 PIRT	35 PIRT
				Pembinaan dan Pengawasan sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT	Jumlah sarana kesehatan, obat, kosmetik dan PKRT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	50 SARANA	50 SARANA	55 SARANA
				Pengembangan Penggunaan Obat Rasional	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi terkait penggunaan obat rasional	50 ORANG	50 ORANG	100 ORG
				Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Jumlah fasyankes yang mengembangkan pelayanan obat tradisional dan komplementer	3 SARANA	3 SARANA	3 SARANA
			1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Dokter Per satuan penduduk	1:978	1:970	1:950
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:135	1:135	1:125
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95%	95%	95%
					Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	60%	60%	65%
					Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif	0%	50%	55%
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0%	75%	80%
					Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0%	60%	65%
					Cakupan Kesehatan Haji	85%	85%	88%
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cempae	Jumlah Kunjungan Pasien	5100 Kunjungan	5100 Kunjungan	5300 kunjungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lakessi	Jumlah Kunjungan Pasien	8000 kunjungan	8000 kunjungan	8200 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lapadde	Jumlah Kunjungan Pasien	4750 kunjungan	4750 kunjungan	4950 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	5600 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lompoe	Jumlah Kunjungan Pasien	4300 kunjungan	4300 kunjungan	4500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lumpue	Jumlah Kunjungan Pasien	6400 kunjungan	6400 kunjungan	6600 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Kusta Lauleng	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	31000 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah Kunjungan Pasien	30600 kunjungan	30600 kunjungan	31000 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lemoe	Jumlah Kunjungan Pasien	2000 kunjungan	2000 kunjungan	2500 kunjungan
				Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Type D Madising Na Mario	Jumlah Kunjungan Pasien	5400 kunjungan	5400 kunjungan	5600 kunjungan
				Penyelenggaraan Layanan Call Centre 112	Jumlah kasus yang ditangani Call Centre 112	16.745 kasus	16.745 kasus	16.945 kasus
				Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan daerah	Jumlah Sampel yang diperiksa	250 sampel	250 sampel	300 sampel
				Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase ibu hamil yang ditangani yang tidak memiliki pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%
				Penyediaan BOK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Kegiatan UKM yang terlaksana	12 lap	12 lap	13 lap
				Penyediaan BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas	12 keg	12 keg	13 keg
				Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan lokmin bulanan dan linsek yang terlaksana di puskesmas	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek	12 kali lokmin bulanan/4 kali linsek

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat tepat waktu	6 pkm	6 pkm	6 pkm
				Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang akreditasi/reakreditasi	0	6 pkm	6 pkm
				Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	Jumlah Labkesda yang terakreditasi	0	1	0
				Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase pasien yang ditanggung pembiayaannya dan ditangani di faskes	100%		100%
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) BPJS	Jumlah puskesmas yang bermitra dengan BPJS	6 pkm	6 pkm	6 pkm
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN)	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan dalam setahun	4 kali	4 kali	4 kali
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Cempae	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lumpue	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lompoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Madising Na Mario	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lapadde	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lakessi	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lemoe	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	Jumlah peralatan penunjang pelayanan/JKN BPJS	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah tatanan yg dicapai	6 Tatanan	6 Tatanan	7 Tatanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Penyelenggaraan SP2TP	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan SP2TP	6 Fasyankes	6 Fasyankes	7 Fasyankes
				Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	Jumlah SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut	12 SD	12 SD	24 SD
				Peningkatan Kesehatan Olahraga, P3K dan BSB	Jumlah pendampingan tim medis pada kegiatan	30	30	35
				Pemantauan Wilayah Setempat	Jumlah RW yang dilakukan PWS	152 RW	152 RW	152 RW
				Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan terkait perkesmas mandiri	120 KK	120 KK	140 KK
				Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah CJH yang mendapatkan pelayanan kesehatan	130 orang	130 orang	130 orang
			1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif	70%	71,42%	91%
					Persentase Usulan Regulasi kesehatan yang diterbitkan	0	25%	25%
					Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	0	25%	30%
				Pengembangan operasional poskeskel	Jumlah poskeskel aktif	11 Poskeskel	11 Poskeskel	11 Poskeskel
				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan	4 media	4 media	4 media
				Penguatan bidang kesehatan melalui regulasi	Jumlah regulasi bidang kesehatan yang diterbitkan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
				Pembinaan Saka Bhakti Husada	jumlah siswa yang dibina melalui Saka Bhakti Husada	30 orang	30 orang	35 orang
				Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah Kader posyandu yang mendapatkan insentif kader	709 orang	709 orang	762 orang
				Pembinaan Kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan	6 Kelompok	6 Kelompok	11 Kelompok
				Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang mendapatkan pembinaan	147 SD	147 SD	147 SD
			1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,036652	0,024435	0,024435
					Prevalensi balita gizi kurang	3,69	3,67	3,05
					Cakupan pemberian ASI Eksklusif	52%	55%	60%
					Cakupan penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan	0%	50%	60%
					Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0%	70%	75%
					Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum	0,00%	0,02%	0,02%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan tenaga gizi terlatih	12 orang	12 orang	10 orang
			20.xx	Pelaksanaan ASI Eksklusif	Jumlah Ibu melahirkan yang melakukan IMD	1.382	1.382	1.658
			20.xx	Penanganan Kasus Gizi Kurang	Persentase penderita gizi kurang yang mendapatkan Perawatan sesuai standar	100%	100%	100%
			20.xx	Pembinaan kelompok rawan gizi	Jumlah kelompok rawan gizi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan gizi	0	22 kelompok	44 kelompok
			20.xx	Pelaksanaan Surveilans Gizi	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan survey Konsumsi	220 RT	220 RT	308 RT
			1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan TTU memenuhi syarat	82%	82%	85%
					Cakupan TPM Memenuhi syarat	75%	80%	85%
					Cakupan air minum/air bersih memenuhi syarat	85%	85%	87%
					Cakupan Pos UKK aktif	20%	20%	40%
					Persentase institusi yang melaksanakan kegiatan olahraga	0	20%	30%
					Cakupan pasar sehat	0	16%	33%
					Cakupan kelurahan ber- STBM	0	13,50%	27%
				Pembinaan dan Pengawasan TTU	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan		90 TTU	100 TTU
				Pembinaan dan Pengawasan TPM	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan		55 TPM	60 TPM
				Pembinaan dan Pengawasan Sarana Sir bersih dan Air minum	Jumlah sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan		110 Sarana	110 Sarana
				Pelaksanaan STBM	Jumlah kelurahan yang menjalankan pilar STBM		3 Kelurahan	6 Kelurahan
				Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Formal dan Informal	Jumlah pos UKK yang aktif melakukan pembinaan dan pemeriksaan pekerja		6 Pos UKK	7 Pos UKK
				Pelaksanaan dan Pengembangan Kesehatan Olahraga	Jumlah institusi yang melaksanakan kesehatan olahraga		8 instansi	8 instansi
				Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pasar yang dibina dan memenuhi syarat kesehatan		1 pasar	2 pasar
			1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kelurahan UCI	100%	100%	100%
					Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	115%	116%	117%
					Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	1/100.000	1/100.000	1/100.000
					Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,10%	0,15%	0,20%
					Tingkat prevalensi Tuberkolosis	240/100.000	238/100.000	236/100.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	65%	70%	80%
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%
					Tingkat kematian karena tuberkolosis	8/100.000	7/100.000	6/100.000
					Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	65%	70%	80%
					Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80%	85%	90%
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%
					Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%
					Angka kejadian malaria	24	24	26
					Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
					proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0
					Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0
					Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	<0,05	<0,05	<0,05
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	85%	90%	92%
					Penggunaan kondom pada perilaku seks beresiko tinggi	60%	70%	70%
					Cakupan pelayanan penderita hipertensi	65%	70%	75%
					Cakupan pelayanan penderita DM	98%	100%	100%
					Cakupan pelayanan penderita Gangguan Kejiwaan	100%	100%	100%
					Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	100%	100%	100%
					Cakupan penanganan penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
					Cakupan penanganan penyakit kusta	RFT 100%	RFT 100%	RFT 100%
					Cakupan penanganan penyakit kanker	1%	20%	20%
					Cakupan perokok usia produktif	5,40%	10%	10%
					Cakupan posbindu aktif	100%	100%	100%
					Cakupan pelayanan kesehatan indera	100%	100%	100%
					Cakupan penanganan penyakit typoid	100%	100%	100%
			22.08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap		2699 bayi	2726 bayi
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio	Jumlah kasus ASF yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%
			22.xx	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia	Jumlah kasus penderita pneumonia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	207	250	275
			22.18	Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru	Jumlah penderita TB yang ditemukan dan mendapatkan perawatan	354	370	400
					Jumlah kasus TB yang terdata dalam program DOTS			
			22.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD	Jumlah fogging fokus yang dilaksanakan	38 fokus	150 fokus	175 fokus
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	Jumlah penderita diare yang mendapatkan pengobatan	4185	4600	5000
			22.xx	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria yang mendapatkan pengobatan	24	25	30
			22.16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	22780	23048	24120
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	Jumlah penderita IMS yang mendapatkan pengobatan	32	30	28
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi	Jumlah penduduk yang mendapatkan deteksi dini hipertensi	13212	13512	13812
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Meliitus	Jumlah penduduk yang mendapatkan screening DM	6818	7499	8250
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kejiwaan dan Napza	Jumlah kunjungan gangguan penyakit kejiwaan	418	418	300

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelacakan dan supervisi KLB	2	2	2
				Pengembangan Surveilans Masyarakat Terpadu	Jumlah RT/RW yang melaksanakan program SMART	75	75	80
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan zoonosis lainnya	Jumlah kelompok peduli rabies yang dibentuk	0,00	1,00	4,00
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kusta	Jumlah pasien kusta yang mendapatkan perawatan	13 orang	12 orang	10 orang
				Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kanker	Jumlah penduduk yang mendapatkan deteksi dini penyakit kanker	284	350	400
				Penatalaksanaan upaya berhenti merokok	Jumlah penduduk yang mendapatkan konseling upaya berhenti merokok	15622,00	17250,00	18975,00
				Pelayanan Pandu PTM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan screening PTM	8185,00	9000,00	9900,00
				Pencegahan dan Penanganan Gangguan Indera	Jumlah penduduk yg mendapatkan deteksi dini gangguan indera	0	800	900
				Pencegahan dan pengendalian penyakit typhoid	Jumlah pasien typhoid yang mendapatkan pelayanan	1382	1520	1670
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis	Jumlah Penduduk yang mendapatkan deteksi dini hepatitis	2675	2675	2700
			1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio posyandu per satuan balita	8,81	8,90	8,91
					Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05
					Cakupan puskesmas	1,5	1,75	1,75
					Cakupan puskesmas pembantu	95,45	95,45	95,45
					Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02
				Pembangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang dibangun	0	3	2
				Rehabilitasi Bangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang direhabilitasi	0	28	28
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana posyandu		28 kit	28 kit
				Pembangunan Puskesmas Baru	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 unit	0	0

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
				Rehabilitasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi	6	7	7
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0	7 paket	7 paket
				Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun	0	0	0
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	0	4 unit	4 unit
				Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	jumlah pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	0	4 paket	4 paket
			1.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pemeriksaan K1-K4 ibu hamil	100/90	100%/90%	100%/92%
					Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri	70%	80%	80%
					Angka kematian bayi (AKI) per 1000 kelahiran hidup	10 /1000 KH	9/1000KH	8/1000KH
					Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	8 /1000 KH	8/1000KH	6/1000KH
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	82%
					Angka kelangsungan hidup bayi	990	991	992
					Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	92%
					Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	8/1000 KH	6/1000 KH
					Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%	92%
					Angka kematian ibu (AKI)	3 kasus	3 kasus	2 kasus
					Cakupan pelayanan nifas	85%	90%	92%
					cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%	85%	86%
					Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60%	60%	
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%	96%
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	90%	92%
					Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	96%	97%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA	
							2019	2020
							TARGET	TARGET
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250	250	300
			32.xx	Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2737 orang	2737 orang	2737 orang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				
			1.02.01.X.X.	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	23%	23%	30%
				Penatalaksanaan kesehatan lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	560	560 orang	560 orang
				Pemberdayaan kelompok Lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan	56	56 kelompok	56 kelompok
				Peningkatan status gizi lansia	Jumlah kelompok lansia yang mendapatkan pembinaan gizi	56	56 kelompok	56 kelompok
			1.02.01.X.X.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe			80%
					Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	3,69	3,67	3,05
				Peningkatan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7958 orang	7958 orang	8356 orang
				Pemantauan pertumbuhan Balita	Jumlah Balita ditimbang yang naik berat badannya	7366 orang	7366 orang	8053 orang
				Peningkatan status gizi balita	Jumlah anak stunting usia 6-24 bulan yang mendapatkan MPASI (PMT Lokal)	35%	35 anak	49 anak
			1.02.01.X.X.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata jaringannya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	2 unit	2 unit	
				Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Pengadaan alkes	2 paket	2 paket	2 paket
				Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah Pegadaan mebeleur	2 paket	2 paket	2 paket
				Pengadaan Sarana dan Prasarana RS yang dibangun	Pengadaan sarana dan prasarana RS yang dibangun	2 paket	2 paket	2 paket

## BAB VIII

### PENUTUP

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023 berfungsi untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, kemudian menterjemahkannya secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Dinas Kesehatan Kota Parepare serta tolok ukur pencapaiannya.

Dengan melaksanakan Revisi Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Daerah yang ingin dicapai.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Parepare setiap tahunnya mulai dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023 menjadi lebih baik.

